

KATALOG LITBANG



**KAJIAN
KELITBANGAN**



**PENGHARGAAN
DAERAH**



**INOVASI
DAERAH**



KATALOG LITBANG merupakan inovasi dalam penyediaan informasi kelitbangan yang ditujukan bagi publik agar dapat mengakses secara mudah hasil-hasil penelitian (kajian) yang telah dilakukan oleh bidang litbang maupun untuk mengakses informasi layanan-layanan kelitbangan lainnya yang menjadi tupoksi Bidang Litbang BAPPEDA Kabupaten Temanggung



Daftar Isi

- 00.** TENTANG LITBANG
BAPPEDA KABUPATEN TEMANGGUNG
- 01.** KAJIAN
KELITBANGAN
- 02.** IDSD
(INDEKS DAYA SAING DAERAH)
- 03.** IID
(INDEKS INOVASI DAERAH)
- 04.** INOVASI DAERAH
(KRENOVA | PENOVA | INOVASI UNGGULAN)
- 05.** PENGHARGAAN DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG
- 06.** KERJASAMA DAERAH
(PERGURUAN TINGGI | PIHAK LAINNYA)
- 07.** TJSPL
(TANGGUNG JAWAB SOSIAL LINGKUNGAN PERUSAHAAN)
- 08.** JJURNAL KELITBANGAN
(BHUMIPHALA)

tentang **LITBANG**

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kabupaten Temanggung merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, yang berkedudukan dibawah serta bertanggung jawab melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan daerah. Sesuai dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Temanggung, disebutkan bahwa Bappeda Kabupaten Temanggung mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah.

Dalam struktur organisasi dan tata kerja di Bappeda terdapat 4 bidang untuk mendukung melaksanakan tugas dan fungsinya, salah satunya adalah **Bidang Penelitian dan Pengembangan**. Bidang Penelitian dan Pengembangan merupakan unsur penunjang fungsi pelaksana penelitian dan pengembangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. Bidang Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh Kepala Bidang, membawahi :



Sub Bidang Penelitian dan Pengkajian



Sub Bidang Pengembangan dan Inovasi

~ eLITe mem**BANG**gakan ~

01

**KAJIAN
KELITBANGAN**

IKUPD

Indikator Kinerja Utama Pembangunan Daerah (IKUPD) merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Indikator Kinerja Utama Pembangunan Daerah (IKUPD) ini berfungsi sebagai alat ukur dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan daerah sehingga terdapat alat ukur yang jelas terhadap kinerja pemerintah daerah. Selain itu, Indikator Kinerja Utama Pembangunan Daerah (IKUPD) ini menjadi alat monitoring dan evaluasi capaian untuk perbaikan perencanaan pembangunan kedepan. Pada konteks Indikator Kinerja Utama Pembangunan Daerah (IKUPD) Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung ini, pengukuran Indikator Kinerja Utama Pembangunan Daerah (IKUPD) dilakukan dengan menganalisis output dan outcome dari capaian Indikator Kinerja Utama Pembangunan Daerah (IKUPD) sesuai dengan RPJMD Kabupaten Temanggung 2018-2023. Pengukuran ini dilakukan secara konsisten untuk mengetahui tren pengembangan pembangunan kedepan dan mengantisipasi dampak dari kelemahan pembangunan untuk mempercepat ketercapaian pembangunan Kabupaten Temanggung yang berkelanjutan.

• INDEKS LAMA

Indeks Pembangunan Pemuda
Indeks Gotong Royong
Indeks Toleransi
Indeks Rasa Aman

• INDEKS BARU

Indikator Pembangunan Kebudayaan
Indikator Pembangunan Olahraga
Indikator Kemudahan Berusaha
Indikator Perencanaan Pembangunan Daerah

• CAPAIAN IKUPD

INDIKATOR	2019	2020	2021
Indeks Pembangunan Pemuda	3,35	3,57	3,78
Indeks Gotong Royong	4,05	4,17	4,33
Indeks Toleransi	4,14	4,00	4,50
Indeks Rasa Aman	4,41	4,36	4,48

Indikator Pembangunan Kebudayaan

Komponen yang diukur dalam Indikator Pembangunan Kebudayaan, antara lain : 1) Ekonomi dan Budaya; 2) Pendidikan; 3) Ketahanan Sosial dan Budaya; 4) Warisan Budaya; 5) Ekspresi Budaya; 6) Budaya Literasi; dan 7) Kesenjangan Gender. Penilaian indeks Pembangunan Kebudayaan akan dilakukan terhadap 5 PD pengampu yang mencakup Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Perlindungan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

TAHUN 2021 : 3,62

Indikator Pembangunan Olahraga

Variabel yang digunakan untuk penilaian Indeks Pembangunan Olahraga antara lain : variabel ruang terbuka olahraga, variabel SDM olahraga, variabel partisipasi masyarakat, variabel kebugaran, variabel performa, variabel kesehatan, variabel literasi fisik, variabel perkembangan persona, dan variabel ekonomi olahraga. Perangkat Daerah yang terlibat adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga serta Dinas Kesehatan.

TAHUN 2021 : 3,31

Indikator Kemudahan Berusaha

Variabel yang digunakan untuk penilaian Indeks Kemudahan Berusaha, antara lain : variabel pembukaan usaha, variabel akses mendapat lokasi, variabel akses keuangan, variabel kebutuhan operasional sehari-hari, serta variabel lingkungan bisnis yang aman. Pada Indeks Kemudahan Berusaha ini terdapat tiga Perangkat Daerah Pengampu Utama yaitu Dinas Penanaman Modal, Dinas Koperasi, UMK, dan Perdagangan serta Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.

TAHUN 2021 : 3,90

Indikator Perencanaan Pembangunan Daerah

Variabel yang digunakan untuk penilaian Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD) yaitu variabel kualitas perencanaan pembangunan daerah dan variabel proses dan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Pada IPPD ini Perangkat Daerah yang menjadi pengampu utama adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

TAHUN 2021 : 4,50

ANALISIS EKONOMI MAKRO

Dalam upaya untuk memahami kondisi makro ekonomi daerah, perlu dilakukan upaya yang sistematis untuk melakukan analisis terhadap indikator-indikator yang dijadikan sebagai ukuran kesuksesan kegiatan pembangunan. Beberapa jenis indikator yang digunakan diantaranya adalah PDRB, PDRB per kapita, inflasi, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Nilai Tukar Petani (NTP), pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan indikator lain yang terkait. Analisis indikator makro merupakan penjelasan kondisi dan perkembangan dari variabel makro dalam pembangunan. Disamping itu juga dijelaskan bagaimana keterkaitan antar variabel sehingga didapatkan informasi yang selanjutnya dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Penyusunan dokumen analisis ekonomi makro bertujuan untuk memberikan gambaran atau pendekatan yang dapat mempermudah perencanaan pembangunan bidang ekonomi Kabupaten Temanggung.

Tujuan Analisis Ekonomi Makro

- Teridentifikasinya data-data indikator Ekonomi Makro Kabupaten Temanggung Tahun 2016-2020 serta proyeksinya di tahun 2021-2024.
- Menganalisis indikator ekonomi makro Kabupaten Temanggung yang ada terkait pertanyaan penelitian *why, how and what for* untuk masing-masing indikator ekonomi makro yang telah teridentifikasi.
- Melakukan perbandingan dan pemetaan dari indikator ekonomi makro yang ada.
- Menganalisis faktor pengungkit, korelasi/pengaruh antar faktor pada Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Temanggung serta *multiplier effect*-nya.
- Menganalisis strategi dan rekomendasi kebijakan melalui identifikasi program atau kegiatan yang bisa membantu meningkatkan indikator ekonomi makro Kabupaten Temanggung.

Hasil Analisis Ekonomi Makro

- PDRB Kabupaten Temanggung berada dalam kisaran Rp 9-15 triliun, yang kurang lebih setara dengan beberapa kabupaten yang berada di sekitarnya. Sepanjang 2012-2019, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung berada dalam kisaran 5 persen. Namun, sejumlah regulasi yang ditujukan bagi upaya penanggulangan penyebaran Covid-19 telah menyebabkan menurunnya PDRB di Kabupaten Temanggung pada tahun 2020.
- Menurunnya sumbangan sektor pertanian dan meningkatnya sumbangan sektor industri selama tahun pengamatan mengindikasikan adanya perubahan struktur perekonomian yang secara gradual sedang terjadi di Kabupaten Temanggung dari sektor primer menuju sektor sekunder.
- Meskipun secara absolut PDRB per kapita (ADHB) meningkat dari waktu ke waktu, namun apabila dilihat dari pertumbuhannya justru mengalami penurunan. Pandemi Covid-19 memperparah pertumbuhan PDRB per Kapita karena tumbuh negatif.
- Pertumbuhan ekonomi pada 2023 hingga 2025 diproyeksikan akan mengalami peningkatan secara gradual dari tahun ke tahun. Pertumbuhan ekonomi pada 2023 akan berkisar pada $2.46\% \pm 1\%$ karena penanganan Covid-19 semakin membaik dan perekonomian telah mulai kembali pada track seperti semula. Di tahun 2024 pertumbuhan ekonomi diperkirakan mencapai $3.68\% \pm 1\%$, dimana peningkatan tidak terlalu tinggi disebabkan adanya kegiatan politik yang dilakukan pada tahun tersebut. Konsentrasi dan aktivitas politik diduga akan mempengaruhi pergerakan ekonomi pada sektor-sektor tertentu. Pada 2025, pertumbuhan ekonomi akan mencapai $4.78\% \pm 1\%$, yang berarti kondisi ini telah menunjukkan Kabupaten Temanggung memiliki kemungkinan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi seperti sebelum adanya Covid-19 yang berkisar pada 5%.
- Rumah tangga yang berasal dari persentil pengeluaran 40 terbawah memiliki kumulatif pengeluaran di atas 20 persen di Kabupaten Temanggung dari tahun 1998 hingga 2020.
- Pola distribusi kumulatif pengeluaran mengindikasikan bahwa tren kenaikan ketimpangan yang terlihat dari koefisien Gini, terutama setelah 2010, disumbangkan secara utama oleh melebarnya jarak antara rumah tangga terkaya dengan rumah tangga termiskin. Sementara itu, rumah tangga menengah tidak mengalami perubahan kesejahteraan relatif yang berarti.
- Hasil proyeksi Indeks Pembangunan Manusia menunjukkan bahwa IPM dari tahun 2022-2025 secara berturut-turut adalah 70,65 (2022); 70,89 (2023), 71,24 (2024), dan 71,51 (2025).
- Selama 2014 hingga proyeksi sampai tahun 2025, angka NTP Kabupaten Temanggung cenderung lebih sering berada di atas 100. Hal ini mengindikasikan terjadinya kenaikan kesejahteraan petani seiring waktu.

Rekomendasi Kebijakan

- Membatasi alih fungsi lahan terutama dari sektor pertanian untuk sektor lainnya terutama industri
- Memastikan para petani menikmati hasil yang optimal dari usahanya
- Membantu menentukan jenis komoditas yang diusahakan agar lebih berhasil guna
- Membantu tata niaga hasil pertanian agar petani terlindungi dari praktek persaingan tidak sehat dalam penentuan harga
- Mendorong agar minat berusaha di bidang pertanian semakin meningkat dengan mendirikan sekolah atau lembaga-lembaga pendidikan dan pelatihan di bidang pertanian
- Intensifikasi produksi
- Membantu akses pasar yang mudah, terutama dalam memutus panjangnya rantai distribusi.
- Pemberian pelatihan transaksi digital atau literasi digital seperti pemasaran digital.
- Membantu untuk mencari networking atau potential buyer, membuka peluang ekspor ke daerah lain maupun ke luar negeri
- Diversifikasi pertanian juga bisa dilakukan
- Peningkatan penggunaan teknologi pertanian, teknologi pengolahan hasil pertanian dan pascapanen juga sebaiknya diperhatikan, karena biasanya pada saat musim panen, harga jualnya adalah rendah

ANALISIS PENCAPAIAN 8 STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN DASAR DAN PENCAPAIAN STANDAR PENDIDIKAN NON FORMAL

Standar Nasional Pendidikan merupakan kriteria atau standar minimal dalam pelaksanaan sistem pendidikan yang berlaku dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar nasional pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan untuk mewujudkan pendidikan nasional yang berkualitas. Tujuan utama Standar nasional pendidikan adalah untuk menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, membentuk karakter, dan peradaban bangsa yang bermartabat.

Standar nasional pendidikan tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Tahun 2006 dan terdapat pembaharuan kebijakan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada Tahun 2016. Standar nasional pendidikan meliputi delapan aspek terdiri atas: Standar Isi; Standar Kompetensi Lulusan; Standar Proses Pendidikan; Standar Sarana dan Prasarana; Standar Pengelolaan; Standar Pembiayaan; Standar Penilaian dan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Standar nasional pendidikan disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Oleh karena itu penting meneliti ketercapaian standar nasional pendidikan di Kabupaten Temanggung untuk menemukan informasi ketercapaian standar nasional pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan ketercapaian standar pendidikan nonformal di Kabupaten Temanggung sebagai dasar dalam mengembangkan kebijakan pendidikan untuk perbaikan kualitas pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan nonformal di Kabupaten Temanggung.

Capaian Standar Nasional Pendidikan Pada Jenjang SD/MI

Kriteria ketercapaian Standar Nasional Pendidikan di Kabupaten Temanggung merupakan standar penilaian pada setiap standar pendidikan. Kriteria ketercapaian dengan standar 80% artinya bila sekolah belum memenuhi 80% dari indikator Standar Nasional Pendidikan maka sekolah dinilai belum mencapai standar minimal pendidikan.

No	Standar Pendidikan	Kriteria ketercapaian (%)			Skor Tertinggi
		<80	(80-90)	>90	
1	Isi	<40	40-45	>45	50
		3 aspek belum tercapai	2 aspek belum tercapai	1 aspek belum tercapai	
2	Proses	<84	84-94,5	>94,5	105
		5 aspek belum tercapai:	3-4 aspek belum tercapai	2 aspek belum tercapai	
3	Kompetensi	<28	28-31,5	>31,5	35
		3 aspek belum tercapai:	2 aspek belum tercapai	1 aspek belum tercapai	
4	Pendidik dan tenaga kependidikan	<64	64-72	>72	80
		4 aspek belum tercapai	2-3 aspek belum tercapai	2 aspek belum tercapai	
5	Sarana dan Prasarana	<84	84-94,5	>94,5	105
		5 aspek belum tercapai	3-4 aspek belum tercapai	2 -3 aspek belum tercapai	
6	Standar Pengelolaan Pendidikan	<60	60-67,5	>67,5	75
		3 aspek belum tercapai	2 aspek belum tercapai	1 aspek belum tercapai	
7	Standar Pembiayaan	<64	64-72	>72	80
		4 aspek belum tercapai	2-3 aspek belum tercapai	2 aspek belum tercapai	
8	Standar Penilaian	<52	52-58,5	>58,5	65
		3 aspek belum tercapai	2 aspek belum tercapai	1 aspek belum tercapai	

Capaian Standar Nasional Pendidikan Pada Jenjang SMP/MTs

Pencapaian standar isi dari 18 sekolah di Kabupaten Temanggung yang memberikan data penelitian, tidak ada yang rendah, hanya ada 2 sekolah mencapai kriteria sedang yakni SMPN 2 Kandangan dan SMP N 1 Tretep.

No	Standar Nasional Pendidikan	Capaian rendah	Capaian sedang	Capaian Tinggi
1	Standar isi	0%	32,5%	87,5%
2	Proses	0%	32,5%	87,5%
3	Kompetensi Lulusan	18,75%	18,75%	62,5%
4	Standar pendidik dan tenaga kependidikan	18,75%	37,5%	43,75%
5	Sarana dan Prasarana	6,25%	25%	68,75%
6	Pengelolaan	0%	6,25%	93,75%
7	Pembiayaan	6,25%	0%	93,75%
8	Penilaian	-	6,25%	93,75%

Capaian Standar Nasional Pendidikan Pada Pendidikan Non Formal

Profil Wajib Belajar pada PKBM di Kabupaten Temanggung

Warga belajar paling banyak pada program kejar paket C sebanyak 1500 anak. Pada paket B sebanyak 542 dan Paket A sebanyak 255 warga belajar. Ini menunjukkan angka yang cukup besar dan penting untuk dikaji lebih lanjut mengapa angka ini cukup tinggi, apalagi warga belajar masih usia sekolah.

Pencapaian Standar Isi

Program yang banyak diselenggarakan oleh PKBM di Kabupaten Temanggung adalah program Kejar Paket B dan C. Program yang belum banyak diselenggarakan adalah program KB, TPA, SPS, Keaksaran Dasar, Keaksaran Usaha Mandiri, Kecakapan Hidup, dan TBM. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum PKBM belum mengembangkan standar isi dengan optimal, masih terbatas dengan program Paket B & Program Paket C. PKBM di Kabupaten Temanggung belum seluruhnya memiliki desa binaan yakni baru sekitar 50%.

Pencapaian Standar Proses

Pencapaian standar proses PKBM belum maksimal, karena belum semua PKBM memiliki perencanaan pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran di PKBM belum menggunakan metode yang variatif, masih menggunakan metode tatap muka dan tutorial, sedangkan model dinamika kelompok yang menggunakan kelompok kecil belum menjadi pilihan utama PKBM. Proses belajar warga belajar PKBM lebih efektif jika diselenggarakan di sanggar belajar. Kehadiran warga belajar masih dalam level cukup, sedangkan kehadiran pendidik relatif belum optimal.

Pencapaian Standar Kompetensi Lulusan

Kompetensi lulusan PKBM di Kabupaten Temanggung belum dirancang dengan optimal, sebagaimana data pada 20 PKBM yang belum seluruhnya memiliki rumusan SKL dan rumusan capaian pembelajaran. Sehingga proses pembelajaran yang dilakukan oleh sebagian PKBM belum mengacu pada standar yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Realitas tersebut berdampak pada capaian dan proses pembelajaran di setiap PKBM.

Pencapaian Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan PKBM

Pendidik di PKBM di Kabupaten Temanggung sebagian besar adalah lulusan S1 pada semua Program PKBM, ini menunjukkan bahwa standar pendidik memenuhi persyaratan namun masih dibutuhkan untuk peningkatan pada pendidik dengan tingkat pendidikan dari SMA untuk menempuh ke jenjang S1. Demikian halnya, untuk kompetensi pendidikan pada layanan program masih membutuhkan tenaga yang profesional dengan tingkat pendidikan S1. Pada standar pendidik ini masih membutuhkan peran pemerintah untuk merancang program peningkatan profesional pendidik PKBM yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi pada masing-masing PKBM di Kabupaten Temanggung.

Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana PKBM

Standar sarana dan prasarana belum cukup dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Dinilai dari aspek prasarana belum tercapai sesuai dengan standar sarana dan prasarana pendidikan, karena dari kelengkapan dan status kepemilikan belum sesuai dengan aturan yang berlaku. Ada kecenderungan bahwa tempat PKBM masih menumpang pada rumah warga dan sekolah, sedangkan keinginan dari para pengurus PKBM untuk memiliki gedung pertemuan sendiri, agar dapat mengembangkan ruang belajar lebih kreatif. Bahkan ada keinginan siswa bahwa PKBM memiliki laboratorium dan peralatan musik yang dapat digunakan untuk mengembangkan keinginan siswa belajar musik.

Pencapaian Standar Pengelolaan PKBM


Perencanaan PKBM membutuhkan konsep kerja yang jelas agar hasilnya bisa terukur. PKBM sudah memiliki konsep visi, misi, dan tujuan PKBM, namun sebagian besar belum memiliki rencana strategis yang jelas dan terukur. Oleh karena itu, capaian standar pengelolaan PKBM masih terbatas pada aspek perencanaan jangka pendek, bahkan ada kecenderungan bahwa rencana pengukuran keberhasilan program PKBM belum terdokumentasi dengan detail pada setiap PKBM di Kabupaten Temanggung. Capaian standar pengelolaan PKBM di Kabupaten Temanggung secara umum belum berhasil dengan optimal, karena masih adanya kendala struktural dan kultural pada setiap PKBM di Kabupaten Temanggung.

Pencapaian Standar Pembiayaan PKBM

Capaian standar pembiayaan belum optimal, karena dari semua indikator untuk mengukur pencapaian standar pembiayaan masih tergolong rendah karena rata-rata masih di bawah 25%. Sumber dana PKBM masih dari pemerintah dalam jumlah yang sangat terbatas, sedang dana pendukung partisipasi masyarakat dan CRS belum digali dari masyarakat Temanggung. Fakta ini membuktikan bahwa PKBM yang sangat membutuhkan partisipasi masyarakat belum terbukti optimal digerakkan oleh pemerintah.

Pencapaian Standar Penilaian Pendidikan PKBM

Capaian standar penilaian pendidikan relatif masih tergolong rendah terlihat pada aspek perencanaan penilaian PKBM masih tergolong rendah (40%). Hasil analisis lapangan yang menemukan bahwa tidak semua siswa mengerti perubahan kebijakan pendidikan. Jika dianalisis dari data pelaksanaan penilaian membuktikan bahwa penilaian dari pihak pemerintah lebih banyak dilakukan oleh fasilitator PKBM, sedangkan dari tugas individu dan kelompok belum menjadi aspek penilaian yang dapat diintegrasikan dalam sistem penilaian. Hal ini penting dilakukan, karena sistem penilaian yang dilakukan dengan beragam, maka akan dihasilkan proses pembelajaran yang lebih efektif dan menyenangkan.



Analisis data di atas menunjukkan beberapa hal penting dalam praktek pendidikan di Temanggung. Pada Pendidikan Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah cukup bagus dalam capaian standar nasional isi, proses, kompetensi lulusan padahal memiliki capaian yang rendah dalam standar pendidik dan tenaga kependidikan serta capaian aspek sarana dan prasarana. Dalam capaian standar pendidikan dan tenaga kependidikan dalam kategori rendah pada aspek banyaknya guru yang belum bersertifikasi namun guru memiliki kinerja yang bagus dibuktikan dengan capaian yang bagus pada aspek lainnya. Sarana dan Prasarana perlu perbaikan terutama pengadaan tempat ibadah dan kantin, serta memenuhi kelengkapan UKS agar lebih memadai agar menjadikan warga sekolah lebih aman dan nyaman selama berada di sekolah. Perbaikan pengelolaan kantin akan meningkatkan kesehatan makanan yang berpengaruh pada kesehatan siswa dan berdampak pada semangat belajar anak. Untuk meningkatkan capaian standar pendidik lebih optimal penting untuk mendorong dan memberikan guru non PNS mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG) dengan memberikan beasiswa. Melalui program PPG ini akan meningkatkan kompetensi dan kinerja professional guru sekaligus menjadikan guru bersertifikasi yang berimplikasi pada tunjangan profesi guru yang berdampak pada kesejahteraan guru.

KAJIAN PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI DAN INVESTASI KABUPATEN TEMANGGUNG

Kawasan Industri adalah tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikelola dan dikembangkan oleh perusahaan kawasan industri. Berdasarkan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031, Kecamatan Kranggan dan Pringsurat diarahkan sebagai Kawasan Peruntukan Industri.

Menurut Master Plan Penyusunan Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri Kabupaten Temanggung (2014) bahwa Kawasan Industri Kabupaten Temanggung diprioritaskan menjadi 3 yaitu :

(1) **Kawasan Industri Badran** (358,6 Ha) diarahkan sebagai kawasan dan kavling untuk industri besar, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta industri non polutan. Sebagai pendukung kegiatan industri, dibangun sarana sarana penghijauan, sarana prasarana jalan, listrik, air, telepon, fasilitas umum, instalasi pengolahan air limbah dan perumahan penduduk.

(2) **Kawasan Industri Kupan** (512,69 ha) diarahkan sebagai kawasan dan kavling untuk industri besar dan UMKM dan industri non polutan. Sarana penunjang kegiatan industri antara lain: penghijauan, sarana prasarana jalan, listrik, air, telepon, fasilitas umum, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan perumahan penduduk.

(3) **Kawasan Industri Ngipik** (266,36 Ha), diarahkan sebagai kawasan dan kavling bagi industri industri besar dan UMKM dan industri non polutan. Sarana penunjang kawasan antara lain: penghijauan, sarana prasarana jalan, listrik, air, telepon, fasilitas umum, IPAL dan perumahan penduduk.

Maksud dan Tujuan

- Melakukan analisis kondisi ekonomi makro daerah di Kabupaten Temanggung dan sekitarnya.
- Melakukan analisis jenis usaha industri yang cocok dan potensial di masing-masing kawasan industri Kabupaten Temanggung.
- Melakukan penataan Kawasan Peruntukan Industri di Lokasi Kawasan Industri Badran, Kawasan Industri Kuppen, dan Kawasan Industri Ngipik.
- Melakukan analisis penyediaan infrastruktur di masing-masing kawasan industri di Kabupaten Temanggung dengan memperhatikan aspek abiotik, biotik, dan sosial (cultural) dan mengacu pola dan struktur ruang di perencanaan tata ruang mulai dari level nasional, provinsi, kabupaten, dan kecamatan.
- Merumuskan kebijakan pengembangan kawasan industri di Kabupaten Temanggung meliputi kebijakan terhadap industri yang sudah ada dan kebijakan terhadap industri baru yang akan muncul.
- Merumuskan peran pemerintah, pemerintah daerah, sektor swasta dan masyarakat dalam mendukung implementasi investasi untuk pengembangan kawasan industri Kabupaten Temanggung.

Hasil

- Analisis secara makro berdasar nilai LQ, Klassen dan Shift-share menunjukkan bahwa sektor Industri merupakan sektor yang memiliki potensi dan daya saing yang kuat untuk berkembang di masa mendatang. Pengembangan sektor industri di Kabupaten Temanggung adalah tepat untuk dilakukan.
- **Berdasarkan jumlahnya**, jenis industri dominan adalah Industri Pengolahan Tembakau (40,36%), disusul Industri Makanan (14,01%), Industri Barang Galian Bukan Logam (3,77%) dan Industri Kayu dan sejenisnya (3,33%).
- **Berdasarkan nilai investasinya**, nilai investasi terbesar adalah Industri Kayu dan sejenisnya (45,76%), disusul Industri Pengolahan Tembakau (21,65%) dan Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia (17,49%).
- **Berdasarkan wilayahnya**, Kecamatan Kranggan, Pringsurat dan Kedu memiliki karakteristik industri padat modal, sementara wilayah Tlogomulyo dominan padat karya. Wilayah kecamatan lainnya cenderung memiliki sifat padat karya.

Hasil

- **Kawasan industri Badran** cenderung lebih tepat untuk kelompok industri 3 yang mencakup Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya yang sebagian juga sudah merupakan industri besar; jenis lain yaitu industri furnitur; dan jasa reparasi Pemasangan Mesin dan Peralatan.
- **Kawasan industri Kupan** cenderung lebih tepat untuk kelompok industri 2 yang mencakup industri tekstil, industri pakaian jadi, industri pengolahan tembakau, industri percetakan dan reproduksi media rekaman, industri bahan kimia, barang galian bukan logam, dan barang logam kecuali mesin dan peralatan.
- **Kawasan industri Ngipik** masih memiliki jenis dan jumlah industri yang terbatas sehingga cenderung lebih tepat untuk kelompok industri 1 (makanan, tekstil dan industri farmasi).
- Penyediaan infrastruktur di masing-masing kawasan industri di Kabupaten Temanggung dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundangan terkait perencanaan kawasan industri. Dalam level teknis, perencanaan infrastruktur dapat mengacu pada standar yang berlaku, misalnya Standar Nasional Indonesia (SNI)
- Kebijakan pengembangan kawasan industri di Kabupaten Temanggung mencakup pada **4 aspek** yaitu (1) aspek organisasi manajemen dan penataan kawasan; (2) aspek penanaman modal, pembiayaan, investasi dan perizinan; (3) aspek sarana dan prasarana, serta (4) aspek lingkungan.
- Peran pemerintah dominan pada aspek pengaturan, fasilitasi dan pencapaian manfaat ekonomi. Sektor swasta berperan sebagai pemanfaat kawasan industri untuk mencapai keuntungan finansial. Masyarakat berperan sebagai penerima manfaat dan dampak, sekaligus menjalankan fungsi kontrol penyelenggaraan kawasan industri. Akademisi mendukung pengembangan kawasan industri melalui masukan untuk mendorong produktifitas, efisiensi operasi serta pengembangan pasar dan peluang ke depan.

ANALISIS KETAHANAN PANGAN DAERAH

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengamanatkan bahwa negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal. Pemerintah Kabupaten Temanggung berupaya melakukan perubahan yang besar dalam mewujudkan ketahanan pangan di wilayahnya. Untuk mencapai ketahanan pangan di wilayahnya, Pemerintah Kabupaten Temanggung menuangkannya ke dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2018.

Tujuan Studi

- Mengidentifikasi ketersediaan pangan di Kabupaten Temanggung, yang meliputi produksi, ketersediaan energi per kapita, ketersediaan protein per kapita, cadangan pangan yang ada yang dikelola masyarakat maupun pemerintah, serta regulasi lahan.
- Menganalisis sistem distribusi pangan di Kabupaten Temanggung, meliputi alat transportasi, akses jalan, gudang pangan serta pasar, dan ketersediaan informasi harga komoditi pangan.
- Menganalisis tingkat konsumsi pangan di Kabupaten Temanggung meliputi jumlah konsumsi pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan, pengetahuan masyarakat, daya beli masyarakat akan pangan dan budaya yang berkaitan dengan pangan.
- Menganalisis pola pangan harapan masyarakat Temanggung dengan membandingkan data primer dan data sekunder.
- Mengevaluasi kebijakan-kebijakan daerah secara regional yang telah diambil selama ini dalam meningkatkan ketahanan pangan di Kabupaten Temanggung.
- Merumuskan rekomendasi kebijakan serta rencana tindak lanjut yang tepat guna peningkatan ketahanan pangan di Kabupaten Temanggung.

Kondisi Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung

Ketersediaan Pangan

Produksi Pangan

Sumber utama pangan karbohidrat di Kabupaten Temanggung merupakan padi dan jagung. Produksi pangan karbohidrat di Kabupaten Temanggung dari tahun 2013-2016 sangat fluktuatif. Naik turunnya produksi sumber karbohidrat di Kabupaten Temanggung disebabkan karena pengaruh cuaca yang ekstrim, Curah hujan yang tinggi dan musim kemarau yang berkepanjangan. Sumber karbohidrat di Kabupaten Temanggung adalah padi, jagung, ketela pohon dan ketela rambat.

Ketersediaan Energi dan Protein

Sumber protein nabati utama di Kabupaten Temanggung adalah kacang tanah dan kedelai. Sumber utama protein hewani di Kabupaten Temanggung adalah daging, telur, susu, dan ikan. Di wilayah Kabupaten Temanggung ikan yang paling diminati dan produksi panennya paling tinggi adalah jenis ikan lele, selanjutnya pada urutan kedua adalah ikan mas (karper).

Ketersediaan energi Kabupaten Temanggung tahun 2013-2017 memiliki trend meningkat (naik), serta telah berhasil memenuhi batas minimal ketersediaan energi yang ditetapkan oleh regulasi sebesar 2200 kkal/kap/hari. ketersediaan energi Kabupaten Temanggung tahun 2013-2017 menunjukkan angka tertinggi pada tahun 2017, yaitu 3.510 kkal/kap/hari.

Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) VIII tahun 2004 merekomendasikan standar minimal ketersediaan protein per kapita per hari sebesar 57 gram/kapita/hari. Ketersediaan protein Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2017 mencapai angka terting di tahun 2016 yaitu 100.6 gram/kapita/hari, dan terendah pada tahun 2013.

Pengelolaan Cadangan Makanan

Cadangan makanan masyarakat merupakan cadangan pangan yang dikelola oleh masyarakat, yang dapat berupa cadangan pangan di tingkat rumah tangga, stok pangan di tingkat pedagang, maupun yang berada pada lumbung-lumbung pangan masyarakat. Sedangkan cadangan pangan pemerintah adalah cadangan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah. Cadangan Pangan Pemerintah terdapat di tingkat desa berupa CPPD (Cadangan Pangan Pemerintah Desa), Kecamatan, Kabupaten, Provinsi yang berada pada BPCP (Balai Pengelolaan Cadangan Pangan), atau pusat yaitu pada perum BULOG.

Distribusi Pangan

Distribusi pangan di Kabupaten Temanggung terdiri dari aspek yang penting yaitu harga panen dan Akses Pangan. Berdasarkan data dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan tahun 2017 ini, ketersediaan informasi harga pangan dan akses pangan telah tercapai sebesar 83%. Menurut metode penyusunan FSVA (*Food Security and Vulnerability Atlas*), akses terhadap pangan dapat dilihat dari beberapa indikator, yaitu persentase penduduk di bawah garis kemiskinan, akses penghubung yang memadai dan persentase penduduk tanpa akses terhadap listrik. Mayoritas penduduk yang berada pada kategori pra sejahtera adalah petani di pedesaan. Sebagian besar bekerja pada usaha tanaman pangan khususnya padi dan jagung dengan skala kepemilikan lahan yang kecil bahkan sebagai buruh tani.

Konsumsi Pangan

Tingkat ketersediaan energi per kapita telah memenuhi batas standar minimal (2.200 kkal/kapita/hari) dari tahun 2013 sampai tahun 2017.

Pola Pangan Harapan

Skor PPH menunjukkan keberagaman konsumsi pangan masyarakat, dimana semakin beragam, semakin tinggi pula skor PPH nya. sampai dengan pertengahan tahun 2017, skor PPH Kabupaten Temanggung adalah sebesar 78,87. Capaian PPH ini masih jauh dari target skor PPH sebesar 90 yang seharusnya tercapai pada tahun 2015. Implikasinya adalah keanekaragaman pola konsumsi masyarakat Kabupaten Temanggung belum optimal. Selain itu, jika dievaluasi lebih lanjut, skor PPH Kabupaten Temanggung justru mengalami penurunan dari capaian skor PPH tahun 2016 sebesar 85,5.

Rekomendasi Kebijakan Ketahanan Pangan di Kabupaten Temanggung

- Penguatan kelembagaan, peningkatan koordinasi dan sinergitas lintas sektor dalam pengelolaan ketersediaan dan penanganan rawan pangan, distribusi, harga dan cadangan pangan serta konsumsi dan keamanan pangan
- Kebijakan diversifikasi komoditas pangan
- Peningkatan dukungan penelitian dan pengembangan pangan lokal

ANALISIS PERKEMBANGAN KOPERASI

Pengertian koperasi menurut Undang-Undang 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, definisi koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Perkembangan Koperasi di Kabupaten Temanggung dalam tahun ini 2014-2016 menurut data dari Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah menunjukkan adanya peningkatan yang baik, dilihat dari pertumbuhan jumlah koperasi yang baru serta penurunan jumlah koperasi yang tidak aktif. Berdasarkan data tahun 2016 jumlah koperasi di Kabupaten Temanggung mencapai 602 unit dari jumlah itu sebanyak 523 koperasi dalam status aktif dan sisanya sebanyak 79 koperasi (13,12%) dalam status tidak aktif. Dari 523 koperasi aktif, diperkirakan kurang dari 50% merupakan koperasi yang sehat dan memenuhi anggaran dasar/ anggaran rumah tangga (AD/ART) koperasi sebagai badan usaha.

Permasalahan koperasi pada umumnya berupa koperasi unit desa yang bangkrut maupun tidak aktif, koperasi tani serta koperasi yang didirikan hanya sebagai sebuah persyaratan untuk mendapatkan bantuan. Adapun kendala lain yang menghambat pertumbuhan dan perkembangan koperasi adalah sebagai berikut:

1. Lemahnya partisipasi anggota;
2. Kurangnya permodalan;
3. Minimnya inovasi produk koperasi;
4. Manajemen koperasi yang tidak sehat;
5. Kurangnya pengawasan dan pemanfaatan teknologi informasi.

Tujuan

- Mengidentifikasi kondisi dan kinerja koperasi di Kabupaten Temanggung;
- Mengidentifikasi kebijakan-kebijakan pengembangan koperasi di Kabupaten Temanggung yang sudah dilaksanakan;
- Menganalisa konsep pengembangan koperasi yang tepat di Kabupaten Temanggung;
- Merumuskan rekomendasi dan rencana tindak lanjut (action plan) pengembangan koperasi di Kabupaten Temanggung.

Gambaran Umum Koperasi di Kabupaten Temanggung

Data koperasi yang aktif di Kabupaten Temanggung menurut kelompok usaha dari Dinas Perindagkop dan UMKM pada tahun 2017 terdapat 18 jenis koperasi. Dengan jumlah total 602 koperasi, 523 koperasi aktif dan 79 koperasi tidak aktif. Populasi koperasi di Kabupaten Temanggung yang tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Temanggung. Kecamatan Temanggung terdiri dari 129 koperasi, Parakan (32) koperasi, Pringsurat (23) koperasi dan Kedu (21). Dan sisanya terdapat di beberapa kecamatan di Kabupaten Temanggung yang persebaran koperasinya tidak lebih dari 10 koperasi. Persebaran koperasi berdasarkan wilayah Kecamatan di Kabupaten Temanggung dapat kita lihat dalam tabel di atas.

Tahun 2016, Kecamatan Temanggung memiliki jumlah koperasi terbesar yaitu 153 koperasi, sedang yang melakukan RAT sebanyak 55 koperasi. Kecamatan Parakan, Pringsurat, dan Kedu pada urutan selanjutnya. Pada Kecamatan Parakan, dari 44 koperasi, hanya 8 koperasi yang melakukan RAT, sedang di Kecamatan Pringsurat, dari 32 koperasi ada 4 koperasi yang melakukan RAT. Koperasi di Kecamatan Kedu, dari 27 koperasi, hanya ada satu koperasi yang menyelenggarakan RAT. Koperasi yang aktif di Kabupaten Temanggung menurut jenisnya adalah sebagai berikut:

1. Koperasi pertanian: 139 (26,7%),
2. Koperasi serba usaha: 129 (24,8%),
3. Koperasi simpan pinjam: (24,80%),
4. Koperasi pegawai negeri: 67 (12,88%), dan
5. Koperasi pasar masing-masing mencapai 2,5 – 4 %.

Profil dan Pengukuran Kinerja Koperasi

Secara statistik, populasi Populasi koperasi terbesar terdapat di Kecamatan Temanggung dimana terdapat 129 koperasi aktif dan 24 koperasi tidak aktif, dan populasi terkecil berada di Kecamatan Tretep dengan tiga koperasi aktif dan satu koperasi tidak aktif. Populasi terbesar dari koperasi aktif berasal dari koperasi pertanian, koperasi serba usaha, koperasi simpan pinjam, dan koperasi pegawai negeri.

Pengukuran kinerja organisasi koperasi terhadap 18 koperasi aktif menghasilkan gambaran menarik terkait dengan kondisi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kinerja koperasi yang di survei. Pengukuran tingkat pentingnya lima belas variabel bagi koperasi menghasilkan **tingkat Kecukupan anggaran, profesionalitas manager dan manajemen, serta manajemen dan pembukuan yang professional** menjadi tiga variabel yang menurut pengelola koperasi sangat penting untuk mendukung aktivitas koperasi. Di sisi lain, variabel pengalaman dan lamanya waktu dalam menjalankan usaha menjadi variabel yang tidak penting dan tidak relevan terhadap tingkat eksistensi dan keberlanjutan aktivitas usaha koperasi ke depan.

Analisis *divergence* pada lima belas variabel aspek kapasitas organisasi menunjukkan lima variabel yang memiliki gap cukup besar antara tingkat pentingnya dan kemampuan dari pengurus dan pengelola. Lima variabel tersebut meliputi (1) pertumbuhan anggota, (2) jejaring dan kerjasama yang dikembangkan, (3) kemampuan inovasi dan semangat kewirausahaan, (4) tingkat Kecukupan anggaran, dan (5) aspek dukungan pemerintah. Lima variabel tersebut memiliki keterkaitan satu sama lain dan menjadi kendala yang dihadapi oleh pengurus maupun pengelola koperasi.

Studi Kasus Koperasi dan Pembahasan

Studi kasus analisis kinerja koperasi dilakukan pada empat koperasi yaitu KUD Sederhana, KPRI KOPKA, Ambu Kopi, dan KSU Berkah Usaha UMKM untuk menggambarkan kondisi dan kinerja koperasi dengan lebih riil. Ketiga koperasi tersebut menggambarkan jenis koperasi yang mengalami stagnasi seperti halnya KUD Sederhana dan KSU Berkah Usaha UMKM. Koperasi yang mengalami perkembangan dan kemajuan dengan didukung basis keanggotaan yang mapan dan inovatif seperti KPRI Kopka Kemenag, dan salah satu anggota koperasi yang berhasil dalam mengembangkan bisnis di bawah kerangka Koperasi KEK yaitu Ambu Kopi.

KUD Sederhana menggambarkan profil koperasi yang mengalami penurunan kinerja baik dilihat dari aspek jumlah anggota maupun aktivitas usaha yang dilakukan. Kurangnya jejaring kerjasama dengan pihak ketiga dalam mengembangkan aktivitas usaha dan kurangnya inovasi yang dilakukan dalam mengembangkan usaha dan produk berdampak pada kecukupan anggaran yang rendah. Hal ini menjadi kendala KUD sederhana untuk berkembang.

KPRI Kopka merepresentasikan jenis koperasi pegawai/karyawan yang cukup berhasil dalam menjalankan aktivitas usaha dengan prinsip-prinsip dan sosial. Pertumbuhan anggota tercatat menurun namun koperasi dapat berkembang dengan baik dengan mengacu pada kemampuan koperasi dalam merealisasikan prinsip-prinsip sosial kepada anggota baik dari PNS maupun karyawan non-PNS. Jejaring dan kerjasama dan inovasi-inovasi menjadi bagian dari koperasi untuk berkembang.

AMBU KOPI merupakan salah satu anggota Koperasi KEK Kecamatan Kledung. Ambu Kopi merupakan bentuk aktivitas anggota yang berhasil dalam mengembangkan aktivitas usaha dan menghasilkan produk unggulan yang bernilai ekonomi tinggi. Pemilik Ambu Kopi melakukan aktivitas pembelajaran (learning) dan membangun kapasitas inovasi untuk mengembangkan produk yang bernilai ekonomi. Aspek jejaring dan kerjasama dengan stake holder terkait menjadi bagian dari keberhasilan Ambu Kopi dalam membangun aktivitas usaha komoditi Kopi Arabika Java Sindoro Sumbing. Pemilik melakukan proses entrepreneurship memulai usaha dengan mengembangkan produk KAJSS dengan melibatkan masyarakat dan komunitas pengembang kopi arabika Sindoro Sumbing.

Studi Kasus Koperasi dan Pembahasan

Kasus bangkrutnya KSU Berkah Usaha UMKM menggambarkan profesionalitas dan motif kepentingan pribadi dari pengurus akan menentukan keberlanjutan koperasi. Ketua koperasi yang tidak memiliki komitmen dan tidak profesional berdampak pada kemunduran aktivitas usaha yang dilakukan oleh koperasi dan berujung pada kebangkrutan. Fenomena menarik muncul dimana aktivitas antar anggota tetap berjalan diluar manajemen koperasi dengan koordinasi salah satu pengurus yang memiliki semangat kewirausahaan sosial.

Studi kasus yang dilakukan terhadap empat koperasi (KUD Sederhana, KPRI KOPKA, AMBU KOPI, dan KSU Berkah Usaha UMKM) menunjukkan faktor kepemimpinan (leadership) berpengaruh besar pada kinerja dan keberlanjutan koperasi yang dikembangkan. Faktor kepemimpinan pada koperasi memiliki karakteristik yang berbeda dengan faktor kepemimpinan pada badan usaha korporasi pada umumnya yang lebih berorientasi profit semata. Faktor kepemimpinan pada koperasi akan dipengaruhi oleh semangat dan jiwa keberpihakan dan kapasitas seorang pemimpin/manajer dalam menciptakan keseimbangan antara orientasi kinerja ekonomi/profit dan tanggung jawab sosial.

Pengukuran kinerja koperasi dilakukan dengan melakukan analisis *divergence* dengan menggunakan 15 aspek kapasitas organisasi dalam menjalankan bisnis koperasi yang sehat. Hasil analisis gap yang dilakukan menghasilkan lima variabel yang memiliki gap cukup tinggi yaitu:

1. pertumbuhan anggota,
2. jejaring dan kerjasama yang dikembangkan,
3. kemampuan inovasi dan semangat kewirausahaan,
4. tingkat kecukupan anggaran, dan
5. aspek dukungan pemerintah.

Tingginya nilai gap dari 15 aspek kinerja organisasi dan tingkat keberhasilan koperasi terhadap 15 variabel yang sama menunjukkan lemahnya kapasitas dan kinerja pengelola koperasi dalam mencapai elemen-elemen kinerja organisasi. Tingginya gap pada lima variabel di atas menjadi gambaran masih rendahnya kapasitas pengurus dan pengelola dalam melakukan prinsip-prinsip pengelolaan organisasi koperasi. Kelima variabel tersebut di atas menunjukkan lima kendala terbesar yang dialami oleh pengurus maupun pengelola bagi koperasi untuk berkembang.

02

IDSD

INDEKS DAYA SAING DAERAH

Daya saing daerah merupakan kemampuan suatu daerah dalam menciptakan nilai tambah untuk meningkatkan kesejahteraan dengan tetap terbuka pada persaingan domestik dan internasional. Tingkat daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu parameter dalam konsep daerah berkelanjutan, semakin tinggi tingkat daya saing suatu daerah maka tingkat kesejahteraan masyarakatnya pun semakin tinggi.

Analisis Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Temanggung ini akan menyajikan informasi hasil pengukuran berbagai bidang kegiatan hasil pembangunan yang telah dilakukan berdasarkan aspek, pilar dan dimensi daya saing daerah sehingga dapat menjadi acuan rekomendasi dalam menyusun dan menerapkan strategi perencanaan pembangunan daerah agar lebih optimal, melalui pemanfaatan seluruh potensi yang dimiliki dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat yang tinggi dan berkelanjutan.

Kabupaten Temanggung merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang berada di antara 2 Pusat Kawasan Strategis Nasional (Borobudur dan Dataran Tinggi Dieng). Selain itu, kondisi geografisnya sebagai hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Progo menyebabkan Kabupaten Temanggung memiliki peranan penting dalam menjaga ketersediaan air di daerah hilir.

Kondisi Terkini

Berdasarkan data perhitungan hasil indeks daya saing daerah Kabupaten Temanggung terkait 4 aspek daya saing daerah yaitu **Aspek Penguat/Enabling Environment (3,354)**, **Aspek Ekosistem Inovasi (3,315)**, **Aspek Sumber Daya Manusia/Human Capital (2,938)**, dan **Aspek Faktor Pasar/Market (2,667)**. Dari keempat aspek tersebut yang masih membutuhkan perhatian lebih adalah **Aspek Sumber Daya Manusia/Human Capital dan Aspek Pasar/Market**. Oleh sebab itu dibutuhkan penanganan/strategi khusus untuk meningkatkannya.

Sedangkan nilai indeks daya saing daerah Kabupaten Temanggung berdasarkan 12 pilar pembangunan sebagian besar masuk kategori tinggi yaitu: Kelembagaan, Kesiapan Teknologi, Infrastruktur, Dinamika Bisnis, Kesehatan, Efisiensi Pasar Produk, Ketenagakerjaan, Ukuran Pasar, Pendidikan dan Keterampilan. Namun masih terdapat 3 (tiga) pilar yang perlu perhatian lebih lanjut yaitu: Kapasitas Inovasi, Perekonomian Daerah, dan Akses Keuangan.

Dari pencapaian skor terkait 4 aspek dan 12 pilar tersebut maka nilai skor Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Temanggung sebesar 3,068 dan termasuk kategori tinggi, meskipun apabila kita bandingkan dengan tahun sebelumnya nilainya turun dikarenakan adanya Pandemi Covid-19.

Tahapan pencapaian kesejahteraan dan keberlanjutan pembangunan daerah perlu mengoptimalkan potensi yang dimiliki untuk menciptakan daya saing daerah. Pembentuk daya saing daerah terdiri dari empat aspek Penguatan/Enabling Environment, Ekosistem Inovasi, Sumber Daya Manusia/Human Capital dan Pasar/Market, yang di dukung oleh 12 pilar, 23 dimensi dan 97 indikator/ kuesioner.

Kondisi Terkini

Berdasarkan gambar tersebut dapat diketahui bahwa aspek yang menjadi pembentuk Daya Saing Daerah (berisi dimensi dan indikator pembentuk) adalah sebagai berikut:

- **Penguat/ Enabling Environment.** Aspek ini memiliki nilai sebesar 3,354. Ada 3 pilar yang mendukung yaitu pilar kelembagaan sebesar 4,300; pilar infrastruktur sebesar 3,583; dan pilar perekonomian daerah sebesar 2,179.
- **Ekosistem Inovasi.** Aspek ini memiliki nilai 3,315. Ada 3 pilar yang mendukung yaitu pilar kesiapan teknologi merupakan pilar penyumbang nilai tertinggi pada aspek ini yaitu sebesar 4,250; pilar dinamika bisnis sebesar 3,250; dan pilar kapasitas inovasi sebesar 2,444.
- **Sumber Daya Manusia/Human Capital.** Aspek ini memiliki nilai sebesar 2,938. Ada 2 pilar yang mendukung yaitu pilar kesehatan yang merupakan nilai tertinggi sebesar 3,125 dan pilar pendidikan dan keterampilan sebesar 2,750.
- **Pasar/Market.** Aspek ini memiliki nilai sebesar 2,667. Ada 4 pilar yang mendukung yaitu pilar efisiensi pasar produk sebesar 3,000; pilar ketenagakerjaan sebesar 3,000; pilar ukuran pasar sebesar 3,000; dan pilar akses keuangan sebesar 1,667.

Formulasi Kebijakan

Dalam upaya meningkatkan daya saing daerah, arah kebijakan sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2018-2023 yang dijabarkan dalam tema tahunan 2021 yaitu pemulihan ekonomi, pemerataan pembangunan wilayah dan pelestarian lingkungan hidup dengan prioritas sebagai berikut:

- 1) Penguatan ekonomi kerakyatan terdampak Covid19
- 2) Reformasi birokrasi (*good governance*);
- 3) Percepatan pengurangan kemiskinan;
- 4) Pemerataan pembangunan wilayah;
- 5) Peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap tata ruang dan lingkungan hidup.

Selain itu, di dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah, RKPd dan Renja Perangkat Daerah juga harus berpedoman pada arah kebijakan dan program prioritas guna meningkatkan daya saing daerah, khususnya terkait dengan pilar kapasitas inovasi, pilar perekonomian daerah, dan pilar akses keuangan yang masih memerlukan penanganan lebih lanjut.

Strategi dan Arah Kebijakan

Sebagai sebuah langkah strategis dalam rangka peningkatan daya saing daerah yang tetap mengacu pada pembangunan berbasis perencanaan dan perencanaan berbasis riset serta terkait dengan inovasi peningkatan daya saing daerah, maka Pemerintah Kabupaten Temanggung telah menetapkan beberapa strategi pembangunan.

PILAR	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Akses Keuangan	Mengoptimalkan kewirausahaan masyarakat dan promosi investasi	Penguatan ekonomi kerakyatan terdampak Covid-19
Perekonomian Daerah	Peningkatan kapasitas, manajemen dan kinerja pemerintah daerah dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi	Reformasi birokrasi (<i>good governance</i>)
Perekonomian Daerah	Keberpihakan kepada masyarakat miskin dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Percepatan pengurangan kemiskinan
Kapasitas Inovasi	Peningkatan kapasitas, manajemen dan kinerja pemerintah daerah dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi	Reformasi birokrasi (<i>good governance</i>)

Tata Kelola dan Dukungan

Dalam rangka mendorong percepatan peningkatan daya saing daerah, pemerintah Kabupaten Temanggung melakukan koordinasi lintas sektoral. Kerjasama dan kolaborasi dengan berbagai pihak, seperti Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian, Dunia Usaha, media, maupun masyarakat telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung. Adapun maksud dari kerjasama dan kolaborasi tersebut adalah untuk mengupayakan program yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung sesuai dengan arah kebijakan prioritas pembangunan.



03

IID

INDEKS INOVASI DAERAH (IID)

Penyelenggaraan pemerintahan pada era desentralisasi (otonomi daerah) telah memberikan harapan besar terhadap upaya peningkatan kemandirian daerah yang berimplikasi pada pelaksanaan pelayanan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat ke arah yang lebih baik. Agar Pemerintah Daerah dapat mandiri dan mensejahterakan masyarakatnya, maka Pemerintah Daerah dituntut untuk lebih profesional dalam melakukan pengelolaan terhadap seluruh sumber daya yang dimilikinya, serta mampu melakukan percepatan dalam rangka mendorong peningkatan pelaksanaan di seluruh aspek, melalui kebijakan-kebijakan yang kreatif dan inovatif yang disesuaikan dengan karakteristik, kemampuan serta kearifan lokal di daerahnya masing-masing. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Kementerian Dalam Negeri berupaya mendorong seluruh Pemerintah Daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota untuk melakukan Inovasi Daerah secara berkesinambungan dalam rangka memajukan daerah dan meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakatnya. Cara tersebut diberi nama Indeks Inovasi Daerah.

Yang dimaksud indeks inovasi daerah adalah himpunan inovasi daerah yang telah dilaporkan kepada menteri dalam negeri sebagai sebuah bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Bentuk kebaruan didasarkan urusan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah pada setiap tingkatannya. Dari hasil indeks inovasi daerah, didapatkan peringkat dari inovasi daerah pada sebuah pemerintahan daerah. Peningkatan inovasi daerah dapat memberikan informasi mengenai pemetaan inovasi daerah, dan dijadikan acuan dasar dalam pemberian penghargaan dan pembinaan bagi pemerintah daerah yang dinilai berhasil menerapkan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sebagai acuan teknis dalam pengukuran hingga pemberian penghargaan tersebut, pemerintah telah menindaklanjuti amanat Peraturan Pemerintah Nomor: 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah berupa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 104 Tahun 2018 tentang Pengukuran, Penilaian, dan Pemberian Penghargaan dan atau Insentif Inovasi Daerah. Peraturan tersebut merupakan pedoman teknis yang harus dijadikan acuan bagi pemerintah dan pemerintah daerah dalam melaksanakan mengukur dan menilai inovasi daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang dijadikan dasar acuan dalam memberikan penghargaan dan insentif Inovasi daerah. Hasil pengukuran dan penilaian dapat dijadikan bahan pembinaan yang akurat dan komprehensif terkait Inovasi daerah.

Hal ini diharapkan dapat lebih memacu kreativitas dan inovasi Pemerintah Daerah yang mendapatkan penghargaan, serta memotivasi Pemerintah Daerah lainnya untuk lebih meningkatkan kreativitas dan inovasi dalam pelaksanaan program dan kebijakannya di seluruh aspek, yang merupakan salah satu bentuk pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan Pasal 373 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menetapkan bahwa “dalam rangka pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Pemerintah memberikan penghargaan kepada Pemerintah Daerah yang berprestasi”.

Kebijakan penilaian dan pemberian penghargaan Pemerintah Daerah yang Inovatif dilaksanakan melalui sistem aplikasi Indeks Inovasi Daerah juga mengandung nilai-nilai strategis yang secara langsung dapat memengaruhi dalam mengupayakan kemandirian daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program dan kebijakan Pemerintah Daerah yang inovatif. Nilai-nilai strategis dimaksud antara lain adalah:

- Memperkuat Kemandirian Daerah. Setiap Pemerintah Daerah diharapkan mampu dan mandiri dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. Di tengah keterbatasan sumber daya, Pemda harus kreatif dan inovatif dalam menyediakan pelayanan publik dan pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat. Pemerintah daerah yang mandiri, pasti akan lebih survive. Tanpa inovasi, daerah akan tertinggal.
- Membangun Citra Positif Pemerintah Daerah. Kesungguhan dan kerja keras Pemerintah Daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat melalui kreativitas dan inovasi, akan meningkatkan kepercayaan dan dukungan masyarakat serta terbentuk citra positif pemerintah daerah di hati rakyat.
- Mendorong Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah untuk melakukan kreativitas dan inovasi serta berkinerja lebih baik demi kesejahteraan masyarakatnya.

Maksud dan Tujuan

Kegiatan Penilaian dan Pemberian Penghargaan Pemerintah Daerah Inovatif melalui aplikasi Indeks Inovasi Daerah, dimaksudkan agar dapat mendorong kompetisi positif antar pemerintah Provinsi dan antar pemerintah Kabupaten/Kota secara transparan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan pembangunan guna terwujudnya kesejahteraan rakyat.

Adapun tujuan kegiatan Penilaian dan Pemberian Penghargaan Pemerintah Daerah Inovatif adalah:

- Memacu dan memotivasi pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk meningkatkan inovasi dan kreativitas dalam pelayanan masyarakat;
- Mendorong arah penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah sesuai dengan kebijakan pembangunan nasional yang selaras dengan penerapan *good governance*;
- Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap proses-proses inovasi yang sedang dilakukan oleh pemerintah daerah;
- Meningkatkan pengawasan dan peran serta masyarakat dalam setiap perumusan kebijakan dan program yang diterapkan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, sehingga dapat diterima (*accepted*) masyarakat, tepat (*appropriated*) dan berkelanjutan (*sustainable*);
- Memberikan penghargaan kepada Pemerintah Daerah yang melakukan inovasi dan kreativitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah secara transparan dan bertanggung jawab dalam upaya peningkatan pelayanan publik, peningkatan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan daya saing daerah.

Profil inovasi daerah untuk penilaian untuk selanjutnya diberikan penghargaan **Innovative Government Award** sebagai Pemerintah Daerah yang Inovatif adalah Inovasi daerah yang telah diterapkan dan diinput oleh pemerintah daerah melalui aplikasi Indeks Inovasi Daerah yang dikelola oleh Pusat Litbang Inovasi Daerah, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Dalam Negeri harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan administrasi.

Bentuk Inovasi Daerah

Penilaian dan Penghargaan Pemerintah Daerah Inovatif melalui aplikasi Indeks Inovasi Daerah Tahun 2019 akan diberikan kepada daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah berhasil melakukan inovasi daerah dalam bentuk:

- Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah;
- Inovasi Pelayanan publik; dan/atau
- Inovasi Daerah lainnya sesuai bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah yang meliputi penataan tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen, seperti: *E-Planning*, *E-Budgeting* dan lain sebagainya.

Inovasi Pelayanan Publik merupakan inovasi dalam penyediaan layanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian layanan barang/jasa publik, serta inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik, yang memberi pelayanan langsung kepada masyarakat seperti: inovasi dalam pelayanan perijinan, inovasi dalam pelayanan kesehatan, inovasi dalam pelayanan pendidikan dan lain sebagainya.

Inovasi Daerah lainnya sesuai bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah adalah segala bentuk inovasi daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, seperti: inovasi dalam bidang urusan pekerjaan umum, inovasi dalam bidang urusan lingkungan hidup dan lain sebagainya.

Jadi penilaian dalam rangka pemberian penghargaan Innovative Government Award kepada Pemerintah Daerah yang Inovatif melalui Indeks Inovasi Daerah adalah penilaian berbasis inovasi daerah dalam berbagai bentuk/bidang inovasi daerah yang telah berhasil dilakukan oleh Pemerintah Daerah baik dari aspek jumlah inovasi daerah (quantity), aspek mutu inovasi daerah (quality) dan aspek dampak/manfaat inovasi daerah (beneficial). Hasil perpaduan penilaian antara berbagai bentuk/bidang inovasi daerah dengan aspek-aspek inovasi daerah menjadi dasar untuk menentukan pemerintah daerah inovatif.

Kriteria Inovasi Daerah

1. Mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi

Setiap inovasi daerah yang diusulkan oleh Pemerintah Daerah harus “mengandung unsur pembaharuan seluruh atau sebagian” artinya bahwa rancang bangun dalam Inovasi Daerah tersebut seluruhnya atau sebagian berbeda dengan rancang bangun yang telah ada.

2. Memberi manfaat bagi daerah dan/atau masyarakat

Inovasi daerah yang telah berhasil dilakukan oleh Pemerintah Daerah diharapkan “memberi manfaat bagi Daerah dan/atau masyarakat” antara lain menambah Pendapatan Asli Daerah, menghemat belanja Daerah, meningkatkan capaian kinerja Pemerintah Daerah, dan meningkatkan mutu pelayanan publik dan/atau ditujukan bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya.

3. Tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

artinya bahwa inovasi daerah dimaksud: tidak menimbulkan pungutan dan/atau kewajiban lainnya bagi warga negara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, misalnya menetapkan pajak atau retribusi Daerah; dan membatasi akses warga negara untuk mendapat pelayanan atau menggunakan hak-haknya sebagai warga negara, misalnya menambah persyaratan untuk memperoleh kartu tanda penduduk yang mengakibatkan sebagian warga negara tidak dapat memenuhinya.

4. Merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

Artinya bahwa inovasi daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah masih dalam koridor yang “merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah” sebagaimana diatur dalam Lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga program/kegiatan inovasi daerah itu memiliki unsur keberlanjutan, yang berlangsung dalam jangka waktu panjang dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara berkesinambungan.

5. Dapat direplikasi

inovasi daerah yang telah berhasil dilakukan oleh Pemerintah Daerah dapat direplikasi di Daerah lain melalui tahapan prosedur dan mekanisme tertentu dengan mempertimbangkan kondisi dan karakteristik wilayah, sosiologis dan kebudayaan, serta potensi daerah yang akan mereplikasi inovasi daerah.

04

**INOVASI
DAERAH**

KRENOVA & PENOVA

Penghargaan Lomba Kreativitas dan Inovasi Masyarakat (KRENOVA) dan Penjaringan Inovasi Masyarakat (PENOVA) adalah bentuk apresiasi yang diberikan kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok dalam melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan penerapan serta perekayasaan teknologi menghasilkan suatu inovasi kreatif.

Lomba Kreativitas dan Inovasi (KRENOVA) Perangkat Daerah dan Masyarakat Kabupaten Temanggung tahun 2022 adalah bentuk kepedulian Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Temanggung kepada para mitra dan inovator yang secara nyata mendukung dalam memajukan produk inovasi untuk masyarakat luas. Inovator-inovator tersebut berasal dari segenap lapisan masyarakat Kabupaten Temanggung baik dari Perangkat Daerah, pelajar, maupun maupun masyarakat umum.

Sebagaimana tujuan awal bahwa fasilitasi Penyelenggaraan Lomba Krenova tidak hanya berhenti pada pemberian penghargaan saja, tetapi para pemenang lomba diberikan fasilitasi dan pembinaan serta pendampingan menuju Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi (PPBT) secara mandiri ataupun melalui pendanaan dari Kementerian Ristek/BRIN, dan lembaga lain. Selain itu, para peserta Lomba Krenova juga mendapatkan beberapa fasilitasi lanjutan, antara lain: Pendaftaran HKI, Hilirisasi Teknologi, Diseminasi dan Penyertaan Pameran.

Maksud

- Memberikan penghargaan kepada masyarakat Temanggung, baik secara perorangan ataupun kelompok, baik pelajar, perangkat daerah, maupun masyarakat umum yang mampu menghasilkan inovasi kreatif dan bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- Menjadi sarana pertukaran dan pembelajaran inovasi;
- Mendapatkan pemenang untuk dikirim sebagai peserta mewakili Kabupaten Temanggung dalam kompetisi inovasi di tingkat yang lebih tinggi.

Tujuan

Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi masyarakat, serta mendukung percepatan pembangunan di Kabupaten Temanggung; serta menciptakan budaya inovasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam rangka peningkatan kinerja dan pelayanan publik serta daya saing daerah.

Metode

Kegiatan Krenova ini mencakup semua hasil kreativitas dan inovasi yang dilakukan oleh masyarakat di bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Guna memperoleh inovasi yang mendukung pembangunan Jawa Tengah maka Lomba Krenova pada Tahun 2022 dengan tema “Dengan Inovasi Teknologi akan memperkuat kapasitas ekonomi masyarakat”, sedangkan Penjaringan Inovasi Masyarakat periode Tahun 2021 - 2022 dengan tema “Pengembangan Budaya Inovasi Masyarakat untuk Kebangkitan UMKM”.
***tema kegiatan KRENOVA dan PENOVA setiap tahun berubah**

Bidang Fokus dan Kategori Inovasi

Masyarakat

1. Agribisnis dan pangan;
2. Energi baru dan terbarukan;
3. Kehutanan dan lingkungan hidup;
4. Kelautan dan perikanan;
5. Kesehatan, obat-obatan dan kosmetika;
6. Pendidikan;
7. Rekayasa teknologi dan manufaktur;
8. Teknologi informasi dan komunikasi;
9. Industri kreatif;
10. Sosial budaya.

Perangkat Daerah

- Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah;
- Inovasi Pelayanan Publik;
- Inovasi Daerah lainnya.

Kriteria Peserta

Masyarakat

- Masyarakat Temanggung;
- Perorangan atau Kelompok, utamanya dari kalangan pelajar SMA/SMK/MA, Ponpes
- mahasiswa dan masyarakat umum;
- Inovasinya tidak sedang diajukan pada lomba sejenis di Kementerian/Lembaga, OPD maupun institusi lain.

Perangkat Daerah

- Peserta berasal dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kecamatan-kecamatan maupun UPT dan BUMD di Kabupaten Temanggung baik perorangan maupun kelompok;
- Inovasi yang diikutsertakan diajukan dalam bentuk proposal;
- Peserta dapat mengajukan lebih dari satu inovasi.

Kriteria Inovasi

Masyarakat

- Merupakan hasil kreativitas dan inovasi perorangan atau kelompok yang telah diterapkan di daerah lokasi peserta maupun daerah lainnya di wilayah Temanggung;
- Hasil karya minimal berupa prototype, apabila metode berupa modul dan/atau dokumen;
- Dapat didiseminasikan dan diterapkan di masyarakat;
- Teknologinya dapat diaplikasikan dalam skala industri;
- Bahan baku yang digunakan berbasis lokal dan ramah lingkungan;
- Mempunyai manfaat yang berkelanjutan

Perangkat Daerah

- Memiliki kebaruan, yaitu memperkenalkan gagasan yang unik dan pendekatan yang baru dalam penyelesaian masalah, atau kebijakan dan desain pelaksanaan yang unik atau modifikasi dari pelayanan publik yang telah ada;
- Efektif, yaitu memperlihatkan hasil yang nyata dan memberikan solusi dalam menyelesaikan permasalahan;
- Bermanfaat, yaitu menyelesaikan permasalahan yang menjadi kepentingan
- dan perhatian publik;
- Dapat ditransfer/direplikasi;
- Berkelanjutan.

Pemenang



2022

Perangkat Daerah



Inovasi Pelayanan Desa Permata

-- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



SI PANJUL JITU

-- Puskesmas Kedu



Sekolah Kopi Gemawang

-- Kecamatan Gemawang

Masyarakat



Tatap Lentera (Tongkat Penuntun Adaptif Disabilitas Sensorik Mata/Netra)

-- Windu Darajat



Budidaya Cacing Lumbricus Rubellus dengan Ultra Media (Inovasi Ternak Cacing Modern)

-- Eka Ratnawati



Si Holer (Alat Pelubang Plastik Mulsa Pertanian)

-- Dinda Septiana

Pelajar



Ekstrak Batang Tembakau (*Nicotiana tabacum* L.) sebagai Insektisida Alami pada Ulat Kubis (*Plutella xylostella*)

-- SMP Negeri 2 Kedu



Saklar Lampu dan Exhaust Fan Toilet Otomatis

-- SMK Negeri Bansari



Pembuatan Produk Fusion Pastry Bakery Menjadi Produk Kreatif dan Kewirausahaan Siswa Tata Boga SMK Swadaya Temanggung

-- SMK SWADAYA Temanggung

Pemenang



2021

Perangkat Daerah



Sinergitas Pentahelix dan SI Prokes

-- Badan Penanggulangan Bencana Daerah



Market Place Online Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Menuju Mandiri & Sejahtera

-- Penganthi



Inovasi Pelayanan Bundaku

-- Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Masyarakat



Minyak Kopi Terapi Herbal di Masa Pandemi Covid 19

-- Eka Ratnawati



Lift Cor Beton Ekonomis (LCBE)

-- Mardiyono



Mimoge Limbah Plastik

-- Bahrhun Mustofa

INOVASI UNGGULAN DAERAH

Inovasi Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 38 tahun 2017 adalah merupakan semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah, berdasarkan prinsip peningkatan efisiensi, perbaikan efektivitas, perbaikan kualitas pelayanan berorientasi untuk kepentingan umum, dilakukan secara terbuka, memenuhi nilai kepatutan dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya serta tidak menimbulkan konflik kepentingan. Inisiatif inovasi dapat berasal dari Kepala Daerah, anggota DPRD, ASN, Perangkat Daerah maupun anggota masyarakat.

Dengan telah diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Inovasi Daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan pemberdayaan peran serta masyarakat dalam rangka peningkatan daya saing daerah melalui inovasi, mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan inovasi di Kabupaten Temanggung dalam upaya untuk mendukung program-program pemerintah maupun dalam mencari solusi pemecahan masalah yang dihadapi di masyarakat.

Inovasi Daerah yang diterapkan dan dikembangkan Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam rangka mengatasi permasalahan pembangunan daerah adalah **GERBANG EMAS (Gerakan Pembangunan untuk Peningkatan Kesehatan, Pelestarian Lingkungan Hidup dan Pemulihan Ekonomi Masyarakat)**. Dengan melakukan gerakan-gerakan kegiatan MANGDEPI (Membangun Desa Pinggiran) di wilayah Kecamatan Candiroto, INFOSERIT (Inovasi Food Estate Embung Bansari Temanggung), Kampoeng Ulin Majapahit di Negeri Beringin Desa Tegal Sari Kec. Kedu. SHIBIRU (pewarna alami yang dikelola koperasi), penghijauan/konservasi sabuk gunung lereng Sindoro, Sumbing dan Prau, Pasar tani pekarangan dan SI PANJUL JITU (Siaga Persalinan Aman Ojo Ucul Jemput Ibu Inpartu). Dalam pelaksanaannya melibatkan semua peran dari Pentahelix (akademisi, praktisi/bisnis, komunitas, pemerintah dan media massa).

MANGDEPI (Membangun Desa Pinggiran) di wilayah Kecamatan Candirotro

Inovasi MANGDEPI merupakan kepanjangan dari Membangun Desa Pinggiran, dalam rangka mendukung program Pemerintah Kabupaten Temanggung dan Kemenparekraf sektor Pemerataan pembangunan wilayah dan lingkungan hidup sebagai Penyangga Wisata Borobudur. Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung siap untuk mendukung program-program pemerintah pusat dengan menciptakan destinasi-destinasi wisata baru yang mempunyai keunikan dan mampu untuk membuka peluang usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat Kabupaten Temanggung.

Inovasi yang dikembangkan di Kampung Adat Gunung Wuluh Desa Canggal Kecamatan Candirotro diantaranya, adalah:

- Wisata adat dapuk pitung tuk, alunan bumi, carani, waduk warga, muter ngalas, songgo tito, nglagar utuh, rembuk adat, sedekah lepen dan sadranan
- Pesona Alam dan 7 (tujuh) air terjun dengan ornamen batu purba yang cukup unik dan indah.
- Masyarakat yang secara alami ramah dan sebagian besar mata pencaharian petani serta kuliner pangan lokal

Dicanangkannya Inovasi Kampung Adat Gunung Wuluh di Desa Canggal Kecamatan Candirotro berdampak positif bagi peningkatan perekonomian masyarakat dan daerah sekitarnya, meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga dan melestarikan lingkungan alam dan kearifan lokal, mendatangkan peluang usaha baru, mendukung program pemerintah terkait konservasi alam.

INFOSERIT (Inovasi Food Estate Embung Bansari Temanggung)

INFOSERIT merupakan konsep pengembangan pangan terintegrasi yang berbasis pada hortikultura, perkebunan, peternakan dan tanaman pangan di suatu kawasan yang berbasis lingkungan, berkolaborasi menyatu dengan pengembangan wisata embung Bansari.

Arah dan tujuan Food Estate yaitu: 1) Pengembangan Model Kemitraan Closed Loop dengan jaminan harga dan pasar bagi petani; 2) Penguatan Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP); 3) Peningkatan Produksi Nasional; 4)Stabilisasi Pasokan dan Harga Komoditas Strategis; dan 5) Kemandirian benih bermutu

Sasaran utama Food Estate adalah : 1) Penyediaan Bahan Baku Industri Makanan; 2) Penyediaan Bahan Baku Benih Bermutu; dan 3) Penyediaan Pasar Lokal, Retail dan Ekspor

Pasar Tani Pekarangan (PASTA KARAN)

Pasar Tani Pekarangan (Pastakaran) adalah bazar hasil tani pekarangan dan pangan lokal, yang dilaksanakan Bidang Ketahanan Pangan dengan peserta bazar para kelompok penerima kegiatan / bantuan Tahun Anggaran 2018 khususnya yang mengembangkan tani pekarangan dan pengolahan pangan lokal.

Memasuki masa pandemi Corona Virus / Covid-19 pertengahan Maret 2020, aktifitas Pastakaran yang sebelumnya berbentuk bazar dan stand pameran untuk sementara dialihkan ke metode online sebagai respon atas pembatasan acara pengumpulan massa (*social distancing*) oleh pemerintah. Pastakaran online melayani pembelian dan pengiriman melalui pemesanan via media sosial dan telepon. Antusiasme pelanggan lumayan baik karena tetap bisa berbelanja komoditas tanpa harus meninggalkan rumah.

Kemudian berkembang mempunyai toko fisik (Farmer Outlet) sebagai pangkalan dari toko online yang sekaligus melayani pembelian langsung (offline). Sebagai sarana interaksi dengan pelanggan dibuatlah group whatsapp khusus pelanggan yang beranggotakan sekitar 300 orang. Selain melalui Farmer Outlet Pastakaran juga membuka stand penjualan dan promosi di arena CFD (Car Free day) Temanggung setiap hari minggu pagi.

Dampak nyata pelaksanaan Pastakaran di Kabupaten Temanggung, yaitu : peningkatan gizi keluarga dan konsumsi pangan lokal ditunjukkan dengan angka PPH Kabupaten Temanggung juga mengalami peningkatan, peningkatan omset melalui penjualan Farmer Outlet 400 ribu hingga 700 ribu per hari sehingga berpengaruh pada angka pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Temanggung.

Kampoeng Ulin Majapahit di Negeri Beringin Desa Tegal Sari Kecamatan Kedu

Kampoeng Ulin Majapahit dari Negeri Beringin diciptakan dalam rangka mendukung program pemerintah Kabupaten Temanggung dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka Pengembangan Budaya Inovasi Masyarakat untuk Kebangkitan UMKM. Proses pembuatan Ulin/tali ini sangat sederhana namun tidak setiap orang bisa membuatnya, namun keunikan yang luar biasa pembuatan tali ini bisa diwariskan secara regenerasi turun temurun dimasyarakat Kampung Ulin/Tali Majapahit Dusun Beringin, lebih dari 90 % penduduk Dusun Beringin trampil dalam membuat seni kerajinan dari bahan ijuk, namun pada waktu sekarang ini yang sangat laku dipasar adalah pembuatan Tali Majapahit.

Menggunakan tenaga kerja lokal setiap bulannya mendapatkan upah tenaga kerja Rp. 2.240.00 dari bekerja membuat tali, secara total jumlah Kepala keluarga dikampung beringin sebanyak 225 KK, kalau setiap bulannya rata-rata 90 KK yang produktif untuk membuat tali majapahit secara rutin penghasilan masyarakat beringin setiap bulannya mendapatkan upah tenaga kerja sejumlah Rp. 201.600.000,. Kerjasama yang terjalin dengan masyarakat sekitar dalam pengadaan bahan baku, setiap bulannya membutuhkan 10.080 kg ijuk, senilai Rp 50.400.000.

Manfaat Inovasi Kampoeng Ulin Majapahit dari Negeri Beringin, yaitu : membuka peluang usaha baru (home industry, meningkatnya pendapatan ekonomi keluarga, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, mengurangi pengangguran, meningkatkan daya saing ekonomi kerakyatan, terciptanya wisata edukasi, terjaganya kelestarian warisan budaya kearifan lokal, masyarakat mendapatkan pengetahuan baru, terciptanya hubungan sinergitas pemanfaatan hasil produk tanaman konservasi lahan berkelanjutan.

SI PANJUL JITU (Siaga Persalinan Aman Ojo Ucul Jemput Ibu Inpartu)

SI PANJUL JITU merupakan kepanjangan dari Siaga Persalinan Aman Ojo Ucul Jemput Ibu Inpartu, di mana Inovasi ini diciptakan untuk mendukung program percepatan pengurangan kemiskinan melalui peningkatan kesehatan. dalam mendukung Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam upaya meningkatkan Angka Harapan Hidup (AHH).

Rendahnya kunjungan ibu bersalin di Puskesmas Kedu yang membuat keterbatasan dalam melaksanakan pemantauan terhadap ibu hamil risiko tinggi, masih adanya dijumpainya kematian ibu dan bayi, dengan dasar tersebut melalui beberapa kajian dalam menangani permasalahan tersebut, di buatlah Inovasi SI PANJUL JITU (merupakan inovasi yang digagas dan diterapkan oleh Dinas Puskesmas Kedu Kabupaten Temanggung dalam rangka meningkatkan angka kesehatan ibu hamil (AKI) dan angka kesehatan bayi (AKB) di wilayah Kedu.

Dalam praktik penerapan inovasi SI PANJUL JITU bersifat kolaboratif, berkesinambungan dan partisipatif (keterlibatan masyarakat secara langsung). Adapun pelaksanaan SI PANJUL JITU melalui beberapa alur, mulai dari membentuk kader Hatiku Sehat (Hamil Restiku Sehat), membuat group whatsapp NGEMIL (Ngobrol Bareng Dengan Ibu Hamil), membuat ASINAN (alarm Persalinan) para bidan memasang pengingat pada telepon genggam jika ibu hamil sudah memasuki usia kehamilan 37 minggu dan menghubungi ibu hamil pada saat tersebut, serta MATOA (Majang Foto Pertama) memasang foto bayi baru lahir atas seizin orang tua untuk diunggah dan di cetak jika diperlukan, kemudian melaksanakan JITU (Jemput Ibu Impartu) menjemput ibu hamil menyongsong persalinan yang aman bila diperlukan penjemputan dengan ambulan.

SHIBIRU

Shibiru dari tanaman *Strobilanthes cusia* merupakan salah satu unggulan Inovasi Kabupaten Temanggung, yang menerima penghargaan terbaik juara II diajang lomba Krenova Tahun 2021 tingkat Provinsi Jawa Tengah. *Strobilanthes cusia* merupakan jenis tanaman penghasil pewarna alam berwarna biru (SIBIRU) dibudidayakan dan dikembangkan oleh masyarakat di lereng Sndoro dan prau, dimana tanaman ini tidak menghendaki lahan secara khusus, dia bisa ditanam di lahan tidak produktif maupun di bawah pohon kopi, jambu dan berdampingan dengan tanaman lain, dan tidak memerlukan pemeliharaan secara khusus. Walaupun sebagai tanaman sampingan namun memberikan nilai ekonomi yang tinggi bagi petani. Sudah 179 orang petani yang budidaya tanaman *Strobilanthes cusia* dengan luas lahan lebih kurang 65 (enam puluh lima) hektar tepatnya di Kecamatan Wonobojo dan Tretep. "Pasta dan powder" indigo dibutuhkan untuk industri kerajinan tekstil dan para penggiat tekstil tradisional berbagai daerah di Indonesia bahkan sudah sampai manca negara Jepang, Philipina, Australia, Amerika.

Produksi *Strobilanthes cusia* menjadi pasta indigo yang dikembangkan di masyarakat Wonobojo dan Tretep membawa dampak langsung, di antaranya:

- Menambahkan lagi koleksi tanaman untuk penggunaan pewarna alam di kerajinan tradisional tekstil.
- Meningkatkan nilai tambah ekonomi masyarakat. Dengan menanam di lahan tak produktif dan di antara tanaman kopi juga buah-buahan yang lebih dulu ada, masyarakat menjadi penyuplai
- Berdirinya KOPERASI "Shidobiru Sakatani Makmur" sebagai wadah kebutuhan petani *Strobilanthes cusia* untuk mengembangkan usaha dai tanaman pewarna alami ini.
- Pasta dan powder dari tanaman *Strobilanthes cusia* lebih diminati para pengrajin tradisi tekstil dibanding dengan tanaman indigo lain karena hasilnya lebih kuat dan mudah prosesnya.

SABUK GUNUNG (Penghijauan/Konservasi Lereng Sindoro, Sumbing dan Prau)

Sabuk Gunung merupakan suatu gerakan dalam upaya pelestarian alam, menghidupkan mata air yang telah kering, menanggulangi tanah longsor di kawasan Gunung Sumbing, Sindoro dan Prau yang dampaknya jangka panjang.

Luas lahan kritis di Kabupaten Temanggung seluas 10.218.59 ha yang tersebar di 20 (dua puluh) Kecamatan, adapun luas lahan kritis yang terluas berada di Kecamatan Kledung dengan luas 1.772.34 ha.

Sabuk Gunung dimaksudkan untuk mendorong semua unsur stakeholder agar termotivasi semangat peduli dalam berpartisipasi menjaga pelestarian lingkungan, agar alam kabupaten temanggung tetap terjaga dan terhindar dari krisis air bersih, serta menanggulangi dari bahaya tanah longsor.

Gerakan sabuk gunung di mulai dengan penanaman tanaman konservasi sejuta pohon, dimana tanaman ini diperoleh dari pemerintah, FTJSLP, Masyarakat, dan Relawan yang ditanam di lereng Sindoro, Sumbing dan Prau.

05

**PENGHARGAAN
DAERAH**

PENGHARGAAN DAERAH

Kabupaten Temanggung mempunyai prestasi dan menerima banyak penghargaan baik skala provinsi, nasional maupun internasional dari berbagai bidang lomba/kompetisi. Pencapaian tersebut merupakan apresiasi sekaligus memberikan semangat untuk berkarya dan berprestasi yang lebih baik di masa mendatang.



Jumlah Penghargaan Kabupaten Temanggung

Penghargaan	2018	2019	2020	2021
Internasional	-	5	6	-
Nasional	10	26	17	14
Regional	14	10	8	4



Penghargaan Tahun 2018

- Penghargaan Anugerah Parahita Eka Praya Tingkat Madya Tahun 2018
- Penghargaan Kabupaten Layak Anak Tingkat Pratama Tahun 2018
- Piagam Penghargaan sebagai Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori Baik Tahun 2018
- Sertifikat BAPETEN Safety and Security Award 2018 kepada RSUD Temanggung tentang Radiologi Diagnostik & Intervensional dengan Predikat Sangat Baik
- Penghargaan kepada Dinarpus Temanggung sebagai Perpustakaan Terbaik Daerah
- Penghargaan kepada Pemkab Temanggung tentang Laporan Keuangan Tahun 2017 dengan capaian Opini WTP
- Piagam Bhumimandala Award tentang Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah Kabupaten Temanggung
- Adiwiyata Nasional kepada SMP N 2 Pringsurat
- Adiwiyata Nasional kepada SMP N 1 Parakan
- Adiwiyata Nasional kepada SMA N 1 Temanggung
- Kalpataru (Kategori Perintis Lingkungan Hidup) kepada Kelompok Tani Margo Rahayu
- Pemegang III Kategori Desa sebagai Pelaksana Terbaik Lomba Lingkungan Bersih dan Sehat kepada Desa Caruban Kec. Kandangan
- Juara Duta Wisata Provinsi Jawa Tengah
- Juara III Pos Lansia Terbaik Tingkat Jawa Tengah
- Penghargaan Peringkat III kepada TKSK Kecamatan Kranggan pada Lomba Pilar-pilar Sosial Berprestasi Tingkat Provinsi Jawa Tengah
- Juara I Kategori Kelompok Tani Upaya Khusus Jagung Teladan 2018 dalam Lomba Penyuluhan Bidang Pertanian Tingkat Provinsi Jawa Tengah
- Juara 2 Penyuluh Inovatif dan Kreatif dalam mensukseskan Program Kartu Tani Jawa Tengah
- Juara 2 Poktan Berprestasi Komoditas Tembakau dalam Kegiatan Pemberian Penghargaan Pelaku Pembangunan Perkebunan dan Petani/Kelompok Tani Berprestasi Tingkat Provinsi Jawa Tengah
- Piagam Penghargaan kepada RSUD Temanggung sebagai Badan Publik Menuju Informatif
- Sertifikat Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001:2005 kepada Disnaker Temanggung
- Juara III Lomba Petugas OP Tingkat UPT Balai Pusdataru Tahun 2018 kepada DPUPKP Temanggung
- Piagam Penghargaan kepada Pemkab Temanggung sebagai Terbaik ketiga Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan DAK Fisik TA 2017 Provinsi Jawa Tengah
- Piagam Penghargaan kepada DPPKAD Kabupaten Temanggung sebagai terbaik ketiga Pemerintah Daerah yang memiliki kesehatan fiskal daerah terbaik se Jawa Tengah dilihat dari LKPD Audited TA 2018
- Sangrai Kopi
- Juara Utama Lomba Krenova Provinsi Jateng



Penghargaan Tahun 2019

- Internasional GACC Opendi Malaysia
- Kejuaraan Renang Internasional Thailand Sport School Games
- Kejuaraan Karate Internasional di Surakarta (South East Asean University Karate Championship) Juara II
- Internasional Kejuaraan Sepatu Roda di Surakarta
- Kejuaraan Karate Internasional di Surakarta (South East Asean University Karate Championship) Juara III
- Juara II Perencanaan Pembangunan Daerah tingkat Nasional
- Juara Harapan I Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Regional II Tahun 2019
- Kabupaten Stop BABS/ODF
- STBM Berkelanjutan Tahun 2019
- Sanitarian Puskesmas Terbaik Kabupaten SBS (ODF) 100% Tahun 2019
- Penghargaan Kabupaten Terbaik Pendataan ERDCK dan Implementasi Kartu Tani 2019 (Kriteria Kecepatan, Komunikasi, & Koordinasi, Kerjasama, Realisasi Penggunaan kartu Tani)
- Maturitas Penyelenggaraan SPIP Level 3
- Pengembangan Hilirisasi dan Kewirausahaan Bidang Perkebunan
- Penghargaan Kabupaten Layak Anak Tingkat Pratama Tahun 2019
- BUMD Terbaik di Indonesia Tahun 2019
- Top Pembina BUMD 2019
- Penghargaan Adipura Kategori Kota Kecil 2019
- Juara I Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019
- Peringkat II kategori Pembina Ketahanan Pangan Adhikarya Pangan Nusantara Provinsi Jawa Tengah 2019
- Juara I Kabupaten Kota Bertransaksi Kartu Tani Terbanyak
- Duta Lingkungan Sehat STBM Kategori Anak Sekolah
- Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas Tingkat Provinsi di Jawa Tengah Tahun 2019
- Pelaksana Terbaik PHBS Tk Provinsi Jawa tengah
- Juara II Stand Terbaik Tingkat Provinsi Jawa Tengah 2019
- Juara III Pesona Produk Kriya Dekranasda Tingkat Provinsi Jawa Tengah 2019
- Juara III Penghargaan Central Java's Potensial Investment Challenge (CJPIC)
- Nasional Catur Piala Ketua DPR RI di Jakarta
- Kejurnas Atletik di Cibinong Bogor Juara I
- Nasional Kejuaraan Renang Terbuka se Indonesia di Yogyakarta Juara I
- Nasional Wushu Junior di Pangkalpinang
- Nasional Wushu Junior di Semarang Juara I
- Nasional Wushu Championship di Yogyakarta
- Nasional Kemah Budaya di Jakarta
- Nasional Kejuaraan Renang terbuka se Indonesia di Yogyakarta Juara II
- Nasional Wushu Junior di Semarang Juara II
- Nasional Lomba O2SN Tingkat Nasional di Semarang
- Nasional Lemkari Piala Menpora di Jakarta
- Kejurnas Atletik di Cibinong Bogor Juara II
- Nasional Championship BMX di Temanggung
- Nasional Kejuaraan Renang Antar Sekolah dan Mahasiswa di Yogyakarta
- Tari Konceran, Juara I Festival Tari Tingkat Provinsi Jateng



Penghargaan Tahun 2020

- Juara I Perencanaan Pembangunan Daerah tingkat Provinsi Jawa Tengah
- Juara I Perencanaan Pembangunan Daerah tingkat Nasional
- IGA (Inovation Government Aaward) Nominasi 10 besar Kabupaten Terfavorit Tingkat Nasional
- Juara Utama (Drone Semprot Pertanian Otomatis) dan Juara Favorit (Hidroponik Organik) Krenova masyarakat Tingkat Provinsi
- Juara III Kategori Pasar Anugerah IDSD Tingkat Prov. Jateng
- Pemilihan Duta Genre tingkat Provinsi Jawa Tengah tahun 2020
- Pemilihan kelompok Bina Keluarga Remaja Mutiara Kasih juara terbaik II
- OPINI WTP yang ke 7
- OPINI WTP yang ke 8
- Juara I Kategori Desa Pelaksana Terbaik Gotong Royong Masyarakat Tingkat Provinsi Jawa Tengah
- Juara III tingkat Provinsi Jawa Tengah Kategori Pelayanan Masyarakat Tahun 2020
- Juara 1 Nasional Wushu Online (7 medali emas)
- Nasional Taekwondo Poomsae virtual juara 1
- Juara 2 Nasional Wushu Online Se Indonesia (3 medali perak)
- Juara 1 dan 2 Balap sepeda Internasional Sirkuit BMX di Banyuwangi (2 medali emas dan 3 medali perak)
- Juara 2 Balap Sepeda tingkat Nasional pada PON
- Juara 1 Balap Sepeda pada International Sirkuit BMX di Jakarta
- Juara 3 Wushu pada Wushu Tournamen
- Juara 3 Sepakbola Putri Special Olympics Indonesia
- Juara 1 Renang tingkat Nasional Akademi angkatan Udara
- Juara 1 Menembak Yon Armed 13 Kostrad Sukabumi
- Juara 1 Wushu UNNES
- Juara 1 Renang PARASWIM Indonesia
- Juara 1 Pencak Silat IPSI Yogyakarta
- Juara 1 Tenis PELTI Kabupaten Bogor, Jawa Barat
- Juara 1 Tenis PELTI Kabupaten Pati, Jawa Tengah

SUSI AWARD

Inovasi daerah dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, yaitu inovasi tata kelola pemerintahan daerah, inovasi pelayanan publik, dan/atau inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Untuk itu perlu mendorong implementasi kebijakan *One Agency One Innovation* yaitu gerakan yang mewajibkan satu instansi menghasilkan minimal satu inovasi setiap tahun. Agar pembentukan inovasi pelayanan publik muncul dari persaingan yang sehat antar instansi serta memenuhi persyaratan objektif penilaian sebagai sebuah inovasi, maka diselenggarakan **SUSI AWARD KABUPATEN TEMANGGUNG**.

SUSI (Sumbing Sindoro Innovation) AWARD KABUPATEN TEMANGGUNG adalah bentuk penghargaan Bupati Temanggung yang diberikan kepada Perangkat Daerah, Kecamatan, Perusahaan, Sekolah, Desa/Kelurahan dan Masyarakat yang telah melaksanakan Inovasi Daerah. Penganugerahan SUSI AWARD dilaksanakan setiap setahun sekali sebagai upaya untuk mendorong Perangkat Daerah agar terus berinovasi dalam meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan serta mendorong masyarakat Kabupaten Temanggung untuk berinovasi dalam rangka meningkatkan kualitas dan kapasitas SDM. Dengan demikian, Kabupaten Temanggung mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat dan perannya, serta peningkatan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) dan meningkatkan Indeks Inovasi Daerah (IID) di Kabupaten Temanggung.

Penghargaan SUSI AWARD menjadi bentuk apresiasi dari Bupati Temanggung kepada para mitra dan inventor/inovator yang secara nyata mendukung dalam memajukan produk inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Penyelenggaraan Penghargaan SUSI AWARD tidak hanya berhenti pada pemberian penghargaan saja, tetapi para pemenang akan diberikan fasilitasi dan pembinaan, serta pendampingan menuju Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi (PPBT) atau start up inovasi secara mandiri ataupun melalui pendanaan dari Kementerian Ristek/BRIN, dan lembaga lain; inkubasi melalui inkubator.

Selain itu, kegiatan ini merupakan bagian dari kewajiban pemerintah untuk mengembangkan invensi dan inovasi. Pemerintah pusat dan daerah wajib menggunakan hasil invensi dan inovasi nasional dalam melakukan pembangunan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sisas Iptek. Dengan demikian, agenda pembangunan Pemerintah Kabupaten Temanggung dan nasional terutama untuk peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing dapat terwujud serta mampu memacu pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah Kabupaten Temanggung.

Maksud Penyelenggaraan SUSI AWARD

Memberikan penghargaan kepada kepada Perangkat Daerah, Kecamatan, Perusahaan, Sekolah, Desa/Kelurahan dan Masyarakat Kabupaten Temanggung, yang mampu menghasilkan inovasi dan kreatifitas dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan Penyelenggaraan SUSI AWARD

- Meningkatkan inovasi daerah untuk mendukung percepatan pembangunan di Kabupaten Temanggung;
- Memotivasi dan mendorong Perangkat Daerah untuk meningkatkan inovasi dan kreatifitas dalam pelayanan masyarakat;
- Mendorong masyarakat untuk selalu berinovasi dalam usaha dan produksi dalam meningkatkan perekonomiannya.

Nominasi SUSI AWARD

1.	Perangkat Daerah Terinovatif	Perangkat Daerah yang telah berhasil melakukan berbagai Inovasi Daerah baik inovasi dalam bentuk Tata Kelola. Pemerintahan Daerah, Pelayanan Publik dan Inovasi bentuk lainnya sesuai dengan kewenangan daerah
2.	Kecamatan Terinovatif	Kecamatan di Kabupaten Temanggung yang telah berhasil melakukan berbagai Inovasi Daerah baik yang berasal dari Instansi, Desa, Sekolah dan masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan setempat
3.	Desa/Kelurahan Terinovatif	Desa/Kelurahan di Kabupaten Temanggung yang telah berhasil melakukan berbagai Inovasi Daerah
4.	Perusahaan/BUMD Terinovatif	Perusahaan/BUMD di Kabupaten Temanggung yang telah berhasil melakukan berbagai Inovasi Daerah
5.	ASN Terinovatif	Seseorang atau kelompok ASN di Kabupaten Temanggung yang telah berhasil melakukan berbagai Inovasi Daerah
6.	Masyarakat Terinovatif	Seseorang atau kelompok masyarakat di Kabupaten Temanggung yang telah berhasil melakukan berbagai Inovasi Daerah
7.	Tenaga Pendidik/Tutor Terinovatif	Dosen, guru, tutor, dan tenaga pendidik lainnya yang telah berhasil melakukan berbagai Inovasi Daerah
8.	Sekolah Terinovatif	Sekolah di Kabupaten Temanggung yang telah berhasil melakukan berbagai Inovasi Daerah (SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA)
9.	Pelajar/Santri/Mahasiswa Terinovatif	Seseorang atau kelompok Pelajar/Santri/Mahasiswa di Kabupaten Temanggung yang telah berhasil melakukan berbagai Inovasi Daerah
10.	UMKM Terinovatif	UMKM di Kabupaten Temanggung yang telah berhasil melakukan berbagai Inovasi Daerah

06

**KERJASAMA
DAERAH**

KERJASAMA DAERAH



Pemerintah Kabupaten Temanggung



Perguruan Tinggi

18 Perguruan Tinggi

Tri dharma perguruan tinggi, yang terdiri dari Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat. Salah satunya KKN.



Perusahaan / Swasta

Diwadahi dalam **Forum TJSLP** (Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan)



Pihak Lainnya

Kerjasama dengan lembaga, rumah sakit, perangkat daerah di tingkat kabupaten dan provinsi, kementerian, dll

KERJASAMA PERGURUAN TINGGI



Tri dharma perguruan tinggi, yang terdiri dari Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

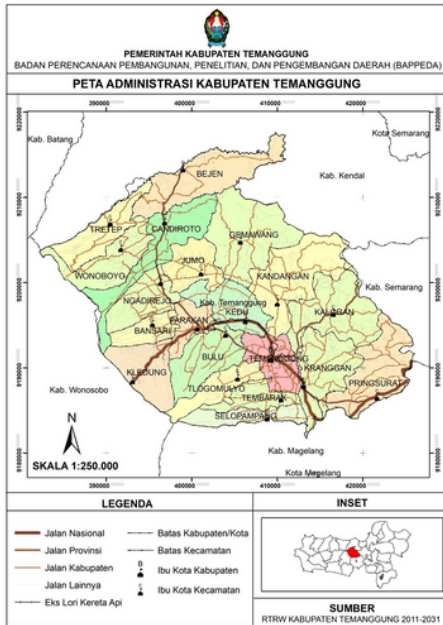


Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa dengan pendekatan lintas keilmuan dan sektoral pada waktu dan daerah tertentu



Kerjasama Perguruan Tinggi dengan Pemerintah Kabupaten Temanggung

- Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Universitas Negeri Semarang
- Akademi Keperawatan ALKautsar
- Universitas Ahmad Dahlan
- Universitas Gadjah Mada
- Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
- Institut Teknologi Sains dan Kesehatan PKU Muhammadiyah Surakarta
- Universitas Muhammadiyah Semarang
- Universitas Diponegoro
- Universitas Sebelas Maret
- Universitas Negeri Yogyakarta
- Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang
- Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto
- Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta
- Institut Islam Nahdhatul Ulama (INISNU) Temanggung
- Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga
- Universitas PGRI Semarang (UPGRIS)
- Universitas PGRI Yogyakarta



Pemetaan desa yang akan menjadi lokasi KKN dilakukan oleh BAPPEDA untuk menghindari tumpang tindih sekaligus pemerataan dalam pelaksanaan kegiatan KKN dari perguruan tinggi yang berbeda.

Pertimbangan Penetapan Desa

- Isu/permasalahan di tingkat Kabupaten
- Isu/permasalahan di tingkat Kecamatan/Kelurahan/Desa
- Inovasi Daerah

Pelaksanaan KKN di Kabupaten Temanggung Tahun 2022

Universitas Diponegoro

11 desa

UIN Salatiga

13 desa

Universitas PGRI Yogyakarta

1 desa

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

3 desa

Universitas Diponegoro

6 desa

Universitas Negeri Yogyakarta

34 desa

INISNU Temanggung

8 desa

Universitas Negeri Semarang

48 desa

Dokumentasi Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kabupaten Temanggung



Penerimaan Mahasiswa KKN UNY Tahun 2022 dengan penempatan di 3 Kecamatan yaitu Kecamatan Kedu, Kecamatan Parakan dan Kecamatan Ngadirejo



Penerimaan Mahasiswa KKN UGM Tahun 2022 dengan penempatan di 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Kaloran dan Kecamatan Kranggan

KERJASAMA PIHAK LAINNYA

- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kantor Cabang Magelang
- PT. Taspen (Persero)
- Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan Kedu Utara
- Kejaksaan Negeri Temanggung
- Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II Kementerian Keuangan Republik Indonesia
- Balai Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kantor Cabang Magelang
- Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika
- Kepolisian Resor Temanggung
- Pengadilan Negeri Temanggung
- Komando Distrik Militer 0706 Temanggung
- Pengadilan Agama Temanggung
- Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Regional Yogyakarta
- PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jateng & DIY Area Magelang
- PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Temanggung
- PT Surya Medika Mulia Sari Semarang
- Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Temanggung dan Rumah Sakit Muhammadiyah Temanggung, Rumah Sakit Gunung Sawo Temanggung
- Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Temanggung
- Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah
- Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Temanggung

07

TJS LP

TJSLP

“

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya.

”

Dasar Hukum

- Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung no. 8 tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan
- Peraturan Bupati Kabupaten Temanggung no. 11 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 126 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

Ruang Lingkup

- Bantuan pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- Percepatan pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan yang selaras dengan program-program Pemerintah Daerah; dan
- Kompensasi pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup.

Sasaran Penyelenggaraan TJSLP

- Bidang kesejahteraan sosial
- Bidang pendidikan, pemuda dan olahraga
- Bidang kesehatan
- Bidang perekonomian rakyat
- Bidang seni, budaya dan pariwisata
- Bidang keagamaan
- Bidang lingkungan hidup
- Bidang kedaruratan

Penyelenggaraan TJSLP ditujukan kepada :

- Masyarakat di sekitar perusahaan
- Masyarakat di wilayah kerja atau di luar wilayah kerja Perusahaan di Daerah

FORUM TJSLP

Forum TJSLP merupakan wadah kerja sama untuk perencanaan dan pelaksanaan TJSLP

Tugas FTJSLP, antara lain :

- Membangun kemitraan dengan perusahaan dan masyarakat dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan TJSLP;
- Mengkoordinasikan penyusunan RKTP (Rencana Kerja Tahunan Perusahaan) - TJSLP;
- Mensinkronkan RKTP-TJSLP dengan Rencana Pembangunan Daerah; dan
- Melaporkan hasil pelaksanaan TJSLP kepada Pemerintah Daerah melalui Tim Fasilitasi TJSLP.

Program Kerja TJSLP

Semester I

- Bantuan Armada Angkutan Bibit Konservasi Lahan
- Bank Pohon

Semester II

- KRENOVA dan PENOVA Kabupaten Temanggung
- Penanganan stunting, air bersih, jamban, RTLH di Desa Duren, Kecamatan Bejen
- Rowali di Kelurahan Kertosari, Kecamatan Temanggung
- Rencana program pendampingan percepatan penurunan stunting di Desa Watukumpul, Kecamatan Parakan
- Penguatan kelembagaan TJSLP
- Material darurat BPBD
- Penguatan kapasitas dan pemberdayaan ekonomi kreatif
- PJU (Penerangan Jalan Umum) di Desa Jumo, Desa Tlahab, dan Desa Gemawang



**Rapat Koordinasi Penyusunan
Program Kerja Forum TJSLP
Semesteran Kabupaten Temanggung
Tahun 2022**



08

**JURNAL
KELITBANGAN**

JURNAL BHUMIPHALA

BHUMIPHALA, Jurnal Pengembangan Daerah

ISSN : 2721-2343 (media online)

Nomor SK Penerbitan ISSN : 0005.27212343/JI.3.1/SK.ISSN/2020.03

Pertama kali terbit tahun 2020.

Jadwal penerbitan setiap bulan **Maret** dan **Oktober**.

<https://jurnalbhumiphala.temanggungkab.go.id/index.php/bhumiphala/index>

BHUMIPHALA adalah Jurnal Pengembangan Daerah elektronik yang menerbitkan artikel-artikel yang berisi Hasil-hasil Penelitian dan Analisis Kebijakan di bidang:

- Pengembangan Wilayah dan Kota
- Pengembangan Ekonomi Kerakyatan
- Pembangunan Daerah
- Kebijakan Publik
- Ekonomi Politik
- Administrasi Negara
- Organisasi
- Potensi Sumber Daya Manusia
- Inovasi dan Teknologi Pembangunan
- Pelayanan Publik
- Keuangan Daerah

Penulis tidak dipungut biaya baik untuk pengiriman artikel maupun pemrosesan artikel.

BAPPEDA Kabupaten Temanggung

Jln. Kadar No.12 Maron Sidorejo, Temanggung, Jawa Tengah,

Kode Pos: 56202; Telp. (0293) 492154, Fax: (0293) 491801,

E-mail: jurnal@temanggungkab.go.id

Copyright ©2019 Bappeda Temanggung

Powered by Open Journal Systems





**- BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN -
BAPPEDA KABUPATEN TEMANGGUNG
2022**